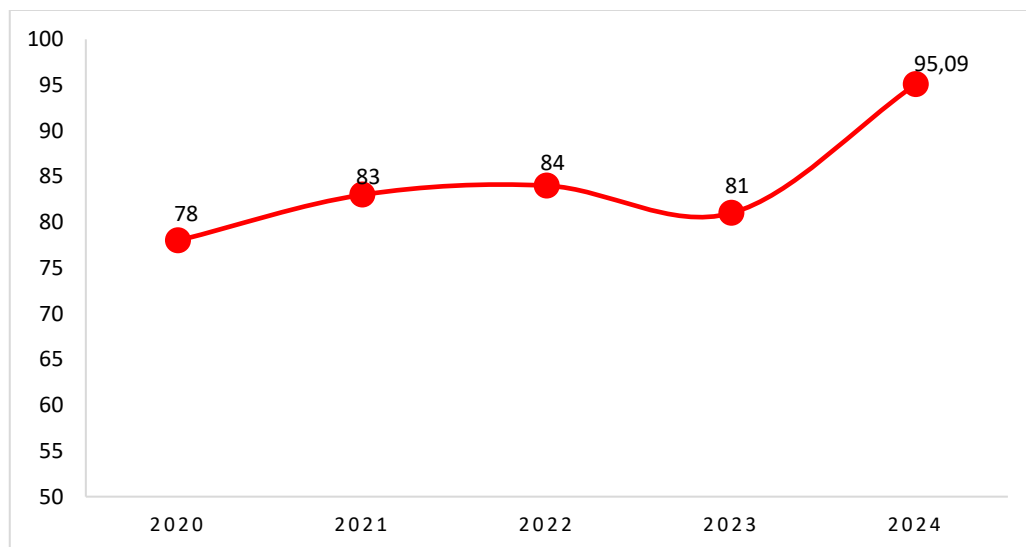




dengan nilai agama, keyakinan dan budaya masyarakat. Dengan demikian, keamanan pangan berperan dalam mendukung kesehatan, pertumbuhan dan kecerdasan masyarakat. Di Kabupaten Klaten, pengawasan dan pembinaan keamanan pangan mengalami peningkatan selama periode 2020–2022. Namun, pada tahun 2023 terjadi penurunan capaian menjadi 81% karena pelaksanaan pengawasan bertepatan dengan berbagai kegiatan lain seperti penyaluran bantuan pangan untuk penanganan stunting, program pengurangan kemiskinan dan Gerakan Pangan Murah untuk menjaga stabilitas harga pangan. Akibatnya, intensitas pengawasan dan pembinaan menurun. Pada tahun 2024, capaian kembali meningkat signifikan menjadi 95,09%. Meski kegiatan tetap padat seperti tahun sebelumnya, pengaturan waktu dan pembagian tugas yang lebih efektif memungkinkan pengawasan dan pembinaan keamanan pangan berjalan optimal.



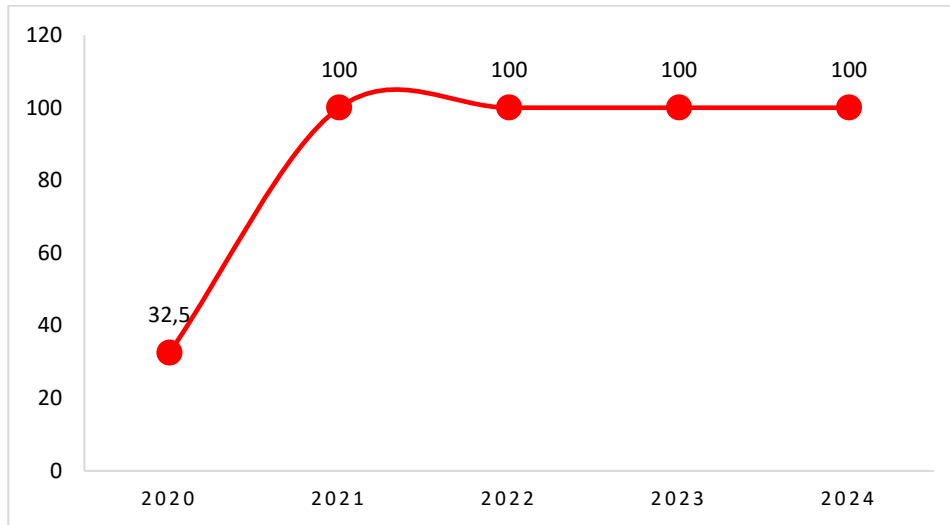
Sumber: Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Perikanan Kab. Klaten, 2024

Gambar 2.8 Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan Kabupaten Klaten Tahun 2020-2024

Pelaksanaan pengawasan keamanan dan mutu pangan di tingkat pusat dan daerah secara umum diarahkan pada dua kegiatan utama, yaitu koordinasi dan penguatan kelembagaan penanganan keamanan pangan segar, serta pemantauan dan pengawasan terhadap pangan segar tersebut. Namun dalam praktiknya, kegiatan ini difokuskan untuk mengatasi berbagai permasalahan, antara lain: kurangnya komitmen daerah, rendahnya pemahaman produsen, konsumen dan aparat, belum diterapkannya praktik usaha yang baik oleh pelaku usaha buah dan sayur, kendala administrasi pencairan anggaran, keterbatasan SDM, sarana prasarana, serta laboratorium terakreditasi, lemahnya koordinasi antar instansi dan belum optimalnya perencanaan kegiatan. Di Kabupaten Klaten, peningkatan ketahanan pangan daerah turut didukung oleh peran kelompok tani yang aktif, baik



secara langsung maupun tidak langsung. Cakupan pembinaan terhadap kelompok tani tersebut terus mengalami peningkatan setiap tahunnya.



Sumber: Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Perikanan Kab. Klaten, 2024

Gambar 2.9 Cakupan Bina Kelompok Tani di Kabupaten Klaten Tahun 2020-2024 (%)

Kelompok tani di Kabupaten Klaten berasosiasi membentuk Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan), yang saat ini berjumlah 397 sesuai dengan SK Bupati Klaten. Dari jumlah tersebut, 28 Gapoktan telah menerima program penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM), sementara sisanya masih memerlukan penguatan serupa. Pemanfaatan lahan pekarangan melalui program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) yang pada tahun 2020 berganti nama menjadi Pekarangan Pangan Lestari (P2L), mengalami peningkatan seiring meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pemanfaatan pekarangan dan dukungan bantuan bagi Kelompok Wanita Tani (KWT). Program ini juga ditujukan untuk membantu pengendalian inflasi akibat kenaikan harga BBM dan dampak perang Rusia-Ukraina. Pada tahun 2021, hanya 7 kelompok memenuhi syarat untuk menerima alokasi P2L sesuai petunjuk teknis dari Kementerian Pertanian. Jumlah ini meningkat menjadi 16 kelompok pada tahun 2022, terdiri dari 7 kelompok yang didanai DAK Non Fisik dan 9 kelompok dari Dana Transfer Umum (DAU). Pada tahun 2023, sebanyak 9 kelompok menerima alokasi program P2L dan tahun 2024 terdapat 16 kelompok. Sebaran lokasi Pemanfaatan Lahan Pekarangan/Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) Tahun 2020-2024 disajikan dibawah ini.



Tabel 2.12
**Lokasi Pemanfaatan Lahan Pekarangan/
Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) Tahun 2020-2024**

No	Tahun	Desa/ Kelurahan	Kecamatan	Kelompok
1	2020	49	21	49
2	2021	7	7	7
3	2022	16	11	16
4	2023	9	8	9
5	2024	16	13	16
	Jumlah	97	607	91

Sumber: Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Perikanan Kab. Klaten, 2024

Cakupan akses air minum yang memadai sangat penting bagi Masyarakat. Selama kurun waktu lima tahun terakhir (2020-2024) cakupan akses air minum di Kabupaten Klaten mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Persentase rumah tangga berakses air minum capaian tahun dari 91,77 % pada tahun 2020 menjadi 94,29 % di tahun 2024, dengan perincian untuk wilayah perkotaan sebesar 94,77% dan wilayah perdesaan sebesar 86,51%.

Terkait dengan upaya penyediaan infrastruktur sanitasi yang sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM), hingga tahun 2024, akses sanitasi di Kabupaten Klaten telah mencapai 100%, baik di wilayah perkotaan maupun perdesaan. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan masyarakat melalui penyediaan layanan dasar yang memadai.

Tabel 2.13
**Cakupan Pelayanan Air Bersih dan Sanitasi
Kabupaten Klaten Tahun 2020-2024**

No	Sektor	Skala	Capaian Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Air Minum	Kabupaten	1.218.317	1.181.835	1.190.459	1.205.331	1.225.924
		%	91,77	92,62	93,19	93,35	94,29
		Perkotaan	487.910	462.103	1.125.360	1.142.340	1.160.863
		%	95,06	93,66	93,72	93,91	94,77
		Perdesaan	731.327	720.819	62.754	63.356	65.061
	%	89,81	92,10	84,55	84,84	86,51	
2	Sanitasi	Kabupaten	1.327.577	1.327.577	1.277.455	1.291.161	1.300.142
		%	100	100	100	100	100
		Perkotaan	513.253	493.395	1.203.610	1.216.481	1.224.933
		%	100	100	100	100	100
		Perdesaan	814.324	782.637	73.845	74.680	75.209
	%	100	100	100	100	100	

Sumber : Bappeda Litbang & DPU PR Kab. Klaten, 2024



Berdasarkan RPJMD Kabupaten Klaten 2021–2026, target cakupan pelayanan air minum ditetapkan 100% pada tahun 2026. Namun, terdapat sejumlah kendala, seperti sulitnya menemukan sumber air di wilayah lereng Merapi, meliputi Desa Tlogowatu, Tegalmulyo, Sidorejo, Tangkil, Kendalsari dan Talun di Kecamatan Kemalang serta adanya sumber air asin di beberapa desa di Kecamatan Cawas, Bayat, Juwiring, Karangdowo dan Pedan. Untuk mencapai target tersebut, berbagai upaya dilakukan melalui pengembangan layanan PDAM, optimalisasi dana desa, pemanfaatan CSR, DAK, hibah air minum, serta program berbasis masyarakat seperti Pamsimas, Sanitasi Desa dan Kotaku. Pada tahun 2024, Pemerintah Kabupaten Klaten juga mengusulkan pendanaan pusat melalui Instruksi Presiden untuk pembangunan jaringan pipa dan sambungan rumah SPAM Cabang Timur di Kecamatan Karangdowo.

Di bidang sanitasi, pada tahun 2020 hingga 2024 cakupan akses dasar atau layak telah mencapai 100%. Target selanjutnya adalah meningkatkan akses sanitasi aman, yaitu fasilitas buang air besar yang terkoneksi ke sistem terpusat atau tangki septik yang disedot berkala dan diolah di IPLT sesuai Permen PUPR No. 29 Tahun 2018. Capaian akses sanitasi aman masih rendah, yakni 1,16% pada tahun 2021, meningkat menjadi 1,327% pada tahun 2022 dan 1,42% pada tahun 2023. Rendahnya capaian ini disebabkan belum optimalnya pendataan pengguna layanan sedot tinja, terutama dari pihak swasta, serta kurangnya kesadaran masyarakat, khususnya di wilayah perbatasan dengan Sukoharjo, Boyolali dan Sleman.

Pada tahun 2024, melalui program Instruksi Presiden (Inpres), Kabupaten Klaten mengusulkan pengadaan 1.000 tangki septik untuk rumah tangga dan 1 truk pengangkut lumpur tinja guna meningkatkan akses sanitasi dari dasar ke layak hingga aman. Upaya ini didukung melalui bantuan jambanisasi bagi masyarakat miskin, pembangunan dan pemeliharaan IPLT Jomboran, serta layanan lumpur tinja terjadwal. Pada 2024, capaian akses sanitasi layak sudah 100% tetapi akses sanitasi aman baru mencapai 1,64%, dengan 91 IPAL skala permukiman terhubung ke 4.213 rumah dan 1.576 rumah terlayani sedot tinja ke IPLT. Kesadaran masyarakat terhadap layanan ini mulai tumbuh, meski data dari penyedia layanan swasta masih belum tersedia.

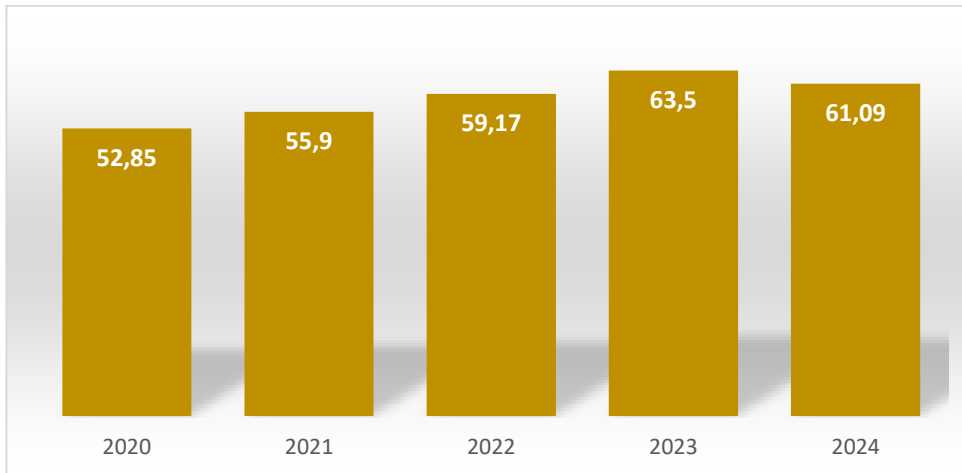
2.2.5. Lingkungan Hidup Berkualitas

Kondisi sumber daya alam dan lingkungan hidup diukur melalui Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH), yang mencerminkan tingkat kualitas lingkungan pada periode dan wilayah tertentu, semakin tinggi nilai indeks, semakin baik kondisi lingkungannya. Di Kabupaten Klaten, IKLH menunjukkan tren peningkatan dari tahun 2020 hingga 2023, namun menurun menjadi 61,09 pada tahun 2024. Penurunan ini mengindikasikan penurunan kualitas lingkungan yang perlu menjadi perhatian





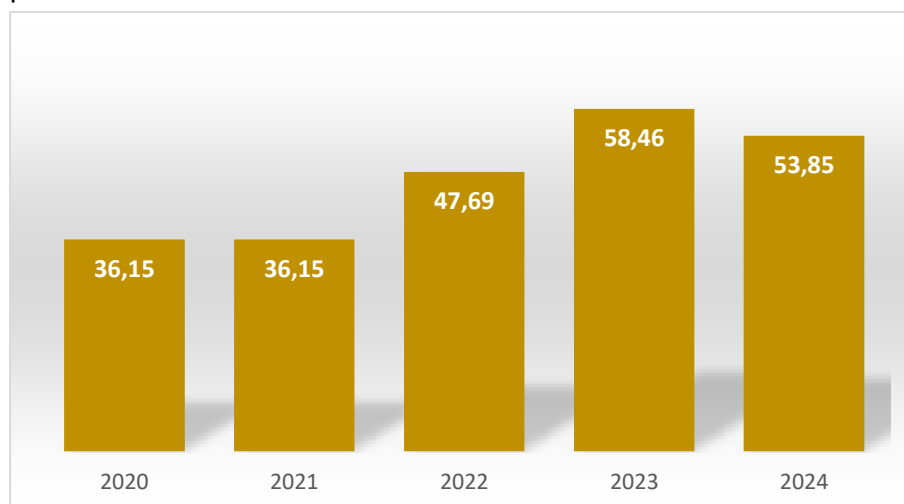
dalam rangka menjaga keberlanjutan sumber daya alam dan kualitas hidup masyarakat.



Sumber: DLH Kabupaten Klaten, 2024

Gambar 2.10 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Klaten Tahun 2020-2024

Hasil pengukuran Indeks Kualitas Air (IKA) Kabupaten Klaten pada tahun 2024 menunjukkan angka 53,85, yang tergolong dalam kategori sedang dan mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya. Penurunan ini disebabkan oleh masih rendahnya peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam menjaga kebersihan sungai, terutama terkait pembuangan sampah dan limbah. Di lapangan, juga ditemukan aktivitas pencucian pasir di beberapa lokasi, khususnya di Kecamatan Jogonalan, yang berdampak pada bendung dan jaringan irigasi. Pemerintah desa, kecamatan dan kabupaten telah melakukan upaya penanganan terhadap permasalahan tersebut.



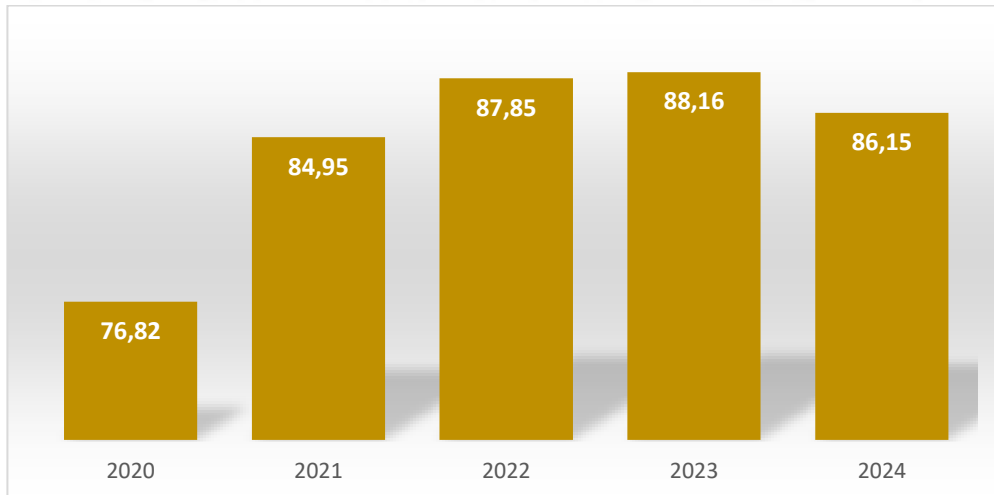
Sumber: DLH Kabupaten Klaten, 2024

Gambar 2.11 Indeks Kualitas Air (IKA) Kabupaten Klaten Tahun 2020-2024





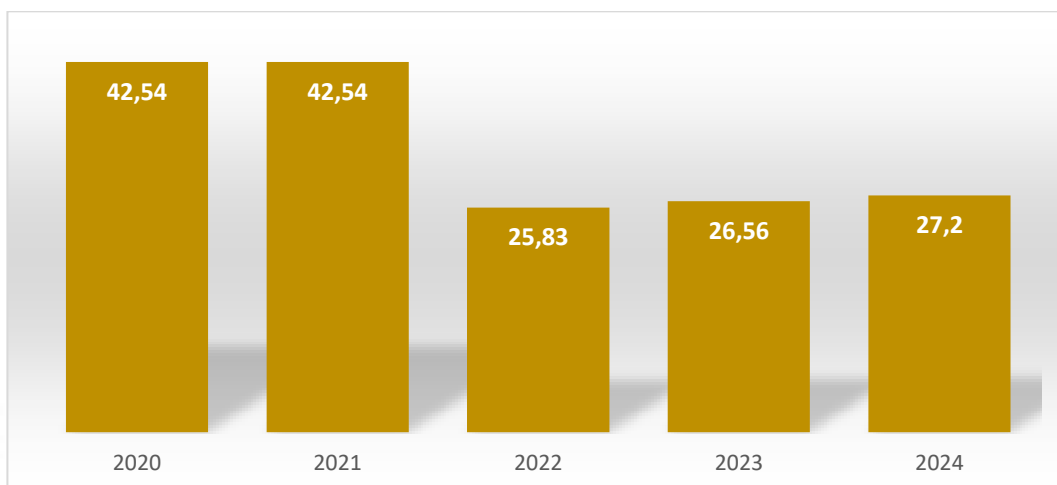
Pengukuran indeks kualitas udara (IKU) Kabupaten Klaten pada tahun 2024 sebesar 86,15, capaian ini menurun dibanding tahun sebelumnya sehingga perlu adanya peningkatan peran serta masyarakat dan pemangku kepentingan untuk ikut mengendalikan pencemaran udara supaya dapat meningkat secara bertahap.



Sumber: DLH Kabupaten Klaten, 2024

Gambar 2.12 Indeks Kualitas Udara (IKU) Tahun 2020-2024

Dari Komposit pembentuk IKLH hanya IKTL yang menunjukkan data positif dari tahun tahun sebelumnya, hasil capaian Pengukuran Indeks kualitas Tutupan Lahan (IKTL) tahun 2022 sebesar 25,83 sedangkan tahun 2023 menjadi sebesar 26,56 dan tahun 2024 sebesar 27,20. Hal ini dikarenakan adanya perbedaan perhitungan berupa perbedaan kelas tutupan lahan yang diakomodir, dari sebelumnya 10 macam kelas tutupan lahan menjadi 19 macam kelas tutupan lahan dengan berbasis data delineasi spasial tutupan lahan dan harus terverifikasi oleh KLHK.



Sumber: DLH Kabupaten Klaten, 2024

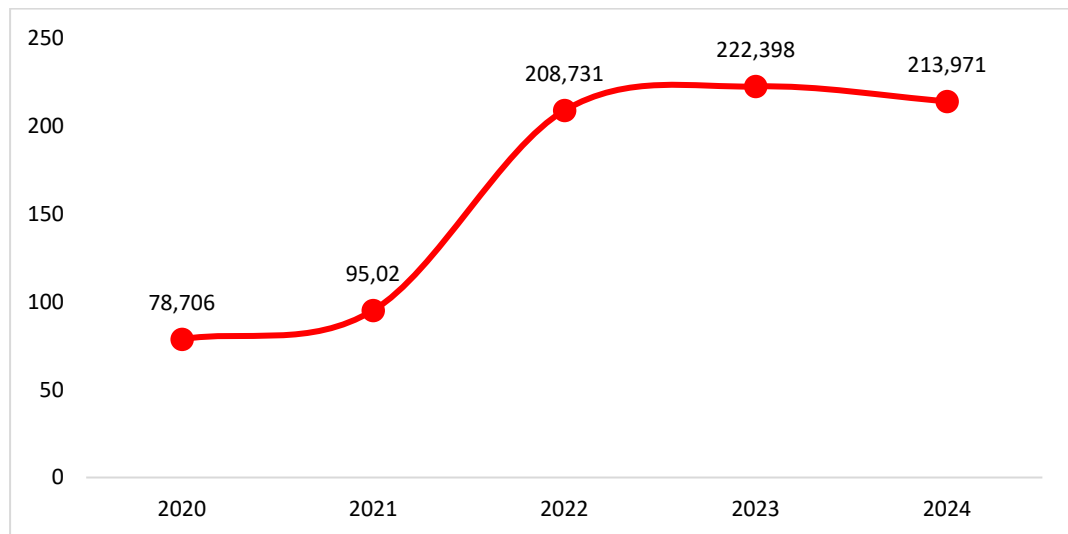
Gambar 2.13 Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) Tahun 2020-2024





Kabupaten Klaten memiliki potensi kawasan hutan yang tersebar dalam beberapa fungsi, antara lain hutan lindung, taman nasional, cagar alam, taman hutan raya, hutan produksi dan hutan negara. Dari seluruh kawasan tersebut, fungsi hutan dengan luasan terbesar adalah Taman Nasional Gunung Merapi (TNGM) seluas 901 hektare, disusul oleh hutan negara seluas 648 hektare, hutan produksi seluas 593 hektare dan hutan lindung seluas 56 hektare. Potensi kawasan ini berperan penting dalam mitigasi perubahan iklim, konservasi keanekaragaman hayati, serta penurunan risiko bencana hidrometeorologi seperti banjir dan longsor.

Sampah menjadi masalah serius yang berdampak negatif pada kesehatan manusia, ekosistem dan merusak lingkungan hidup. Jumlah sampah yang terolah di fasilitas pengolahan sampah dalam kurun waktu lima tahun terakhir menunjukkan tren peningkatan yang signifikan. Pada tahun 2020, volume sampah yang berhasil diolah tercatat sebesar 78.704 ton dan terus mengalami peningkatan hingga mencapai 213.971 ton pada tahun 2024. Peningkatan ini mencerminkan adanya perbaikan dalam sistem pengelolaan sampah, baik dari segi kapasitas fasilitas, teknologi pengolahan, maupun kesadaran masyarakat dalam memilah dan mengelola sampah secara lebih baik. Kondisi persampahan di Kabupaten Klaten dapat digambarkan melalui data timbulan sampah yang terus meningkat seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk.



Sumber: DLH Kab. Klaten, 2025

Gambar 2.14 Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah di Kabupaten Klaten Tahun 2020-2024

Pada tahun 2024, timbulan sampah telah mencapai 263.706,32 ton per tahun, menunjukkan peningkatan dibanding tahun sebelumnya. Peningkatan volume sampah ini menjadi tantangan serius, terutama karena kapasitas lahan penampungan tidak bertambah, bahkan cenderung berkurang. Untuk menjaga kelestarian lingkungan dan mengatasi keterbatasan lahan, diperlukan pengolahan



sampah yang lebih optimal, termasuk penambahan indikator Timbulan Sampah Terolah melalui fasilitas pengolahan yang tersedia. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah daerah untuk memberikan perhatian ekstra terhadap pengembangan fasilitas dan infrastruktur pengelolaan limbah padat, mengingat pengelolaan sampah yang kurang memadai dapat berdampak langsung pada kondisi kesehatan lingkungan serta kualitas hidup masyarakat.





Tabel 2.14
Timbulan Sampah di Kabupaten Klaten Tahun 2020-2024

No	Kecamatan	Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024	
		Jumlah Penduduk (jiwa)	Jumlah sampah dihasilkan (kg)	Jumlah Penduduk (jiwa)	Jumlah sampah dihasilkan (kg)	Jumlah Penduduk (jiwa)	Jumlah sampah dihasilkan (kg)	Jumlah Penduduk (jiwa)	Jumlah sampah dihasilkan (kg)	Jumlah Penduduk (jiwa)	Jumlah sampah dihasilkan (kg)
1	Bayat	65.771	19.731	63.486	19.046	63.734	31.867	64.262	32.131	66.447	33.423
2	Cawas	60.704	18.211	57.548	17.264	57.675	28.838	58.105	29.053	58.409	29.380
3	Ceper	68.188	20.456	43.516	13.055	64.915	32.458	65.595	32.798	66.069	33.233
4	Delanggu	43.505	13.051	46.270	13.881	42.122	21.061	42.486	21.243	42.628	21.442
5	Gantiwarno	41.443	12.432	38.642	11.593	38.642	19.321	38.955	19.478	39.151	19.693
6	Jatinom	62.183	18.654	45.856	13.757	60.186	30.093	61.036	30.518	61.744	31.057
7	Jogonalan	61.927	18.578	42.941	12.882	59.002	29.501	59.676	29.838	60.093	30.227
8	Juwiring	61.325	18.397	42.124	12.637	58.363	29.182	58.979	29.490	59.374	29.865
9	Kalikotes	38.217	11.465	19.922	5.977	36.993	18.497	37.405	18.703	37.680	18.953
10	Karanganom	47.406	14.221	60.232	18.070	46.389	23.195	46.895	23.448	47.391	23.838
11	Karangdowo	45.557	13.667	62.757	18.827	43.328	21.664	43.866	21.933	43.923	22.093
12	Karangnongko	38.367	11.510	65.094	19.528	36.805	18.403	37.285	18.643	37.477	18.851
13	Kebonarum	21.140	6.342	58.918	17.675	19.808	9.904	19.870	9.935	19.955	10.037
14	Kemalang	40.343	12.102	37.108	11.132	39.602	19.801	40.135	20.068	40.487	20.365
15	Klaten Selatan	45.546	13.663	47.945	14.384	44.045	22.023	44.707	22.354	45.287	22.779
16	Klaten Tengah	42.865	12.859	41.206	12.362	41.107	20.554	41.352	20.676	41.671	20.961
17	Klaten Utara	49.256	14.776	43.927	13.178	47.980	23.990	48.590	24.295	48.972	24.633
18	Manisrenggo	44.336	13.300	36.760	11.028	43.232	21.616	43.707	21.854	44.040	22.152
19	Ngawen	47.304	14.191	46.907	14.072	45.869	22.935	46.125	23.063	46.401	23.340
20	Pedan	49.000	14.700	58.274	17.482	46.875	23.438	47.395	23.698	47.761	24.024
21	Polanharjo	43.179	12.953	53.696	16.109	40.949	20.475	41.303	20.652	41.433	20.841
22	Prambanan	52.957	15.887	51.363	15.409	51.708	25.854	52.461	26.231	52.911	26.614
23	Trucuk	82.226	24.667	79.039	23.712	79.218	39.609	80.167	40.084	80.709	40.597
24	Tulung	55.805	16.741	39.447	11.834	53.948	26.974	54.554	27.277	55.043	27.687



No	Kecamatan	Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024	
		Jumlah Penduduk (jiwa)	Jumlah sampah dihasilkan (kg)	Jumlah Penduduk (jiwa)	Jumlah sampah dihasilkan (kg)	Jumlah Penduduk (jiwa)	Jumlah sampah dihasilkan (kg)	Jumlah Penduduk (jiwa)	Jumlah sampah dihasilkan (kg)	Jumlah Penduduk (jiwa)	Jumlah sampah dihasilkan (kg)
25	Wedi	54.672	16.401	52.039	15.612	52.061	26.031	52.526	26.263	52.814	26.565
26	Wonosari	64.355	19.306	41.013	12.304	62.899	31.450	63.724	31.862	64.272	32.329
	Jumlah	1.319.530	398.273	1.276.030	382.809	1.277.455	638.728	1.291.161	645.581	1.302.142	654.977

Sumber: DLHK dan DPU PR Kab. Klaten, 2025



Saat ini, satu-satunya Tempat Pembuangan Akhir (TPA) yang masih beroperasi di Kabupaten Klaten adalah TPA Troketon yang berlokasi di Kecamatan Pedan. Sementara itu, TPA Beteng, Jomboran, Joho dan Candirejo sudah tidak beroperasi. Selain pengangkutan ke TPA Troketon, pengelolaan sampah di Klaten juga dilakukan melalui berbagai upaya pengurangan sampah, seperti pembangunan TPS3R oleh masyarakat secara swadaya maupun oleh pemerintah daerah, pembentukan bank sampah, serta budidaya maggot. Upaya-upaya ini merupakan bagian dari strategi penanganan sampah yang dilaksanakan selama periode 2020–2024.

Tabel 2.15
Penanganan Sampah di Kabupaten Klaten Tahun 2020 – 2024

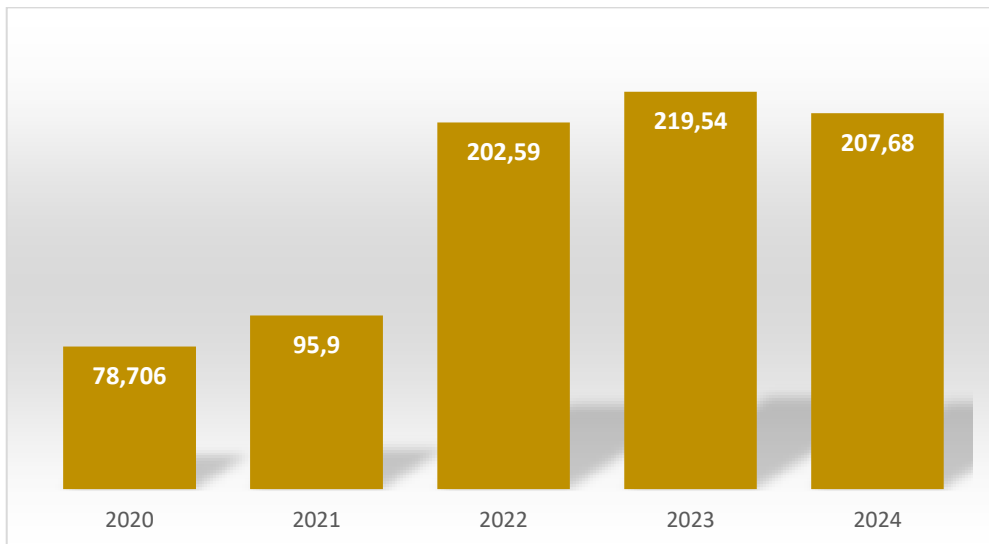
Unit	Keterangan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Bank sampah	Jumlah Unit	45	45	62	62	60
	Kemampuan Pengolahan (ton/hari)	0,05	0,05	1,89	1,90	1,8974
	Jumlah Sampah ditangani (ton)	2,25	2,25	1,89	1,90	1,182
	Persentase Terhadap Total Timbunan Sampah	0,58	0,57	0,30	0,30	0,18
Pengolahan sampah mandiri	Kemampuan Pengolahan (ton/hari)	-	100	-	0	0,01685
Penanganan setempat TPS3R	Jumlah Unit	17	23	33	33	41
	Kemampuan Pengolahan Pengangkutan (ton/hari)	0,83	0,83	106,44	100,92	86,7572
	Jumlah Sampah ditangani (ton)	14,17	19,09	100,30	98,07	84,0248
	Persentase Terhadap Total Timbunan Sampah	3,58	6,26	15,72	15,37	12,83
TPA Troketon	Jumlah Unit	1	1	1	1	1
	Kemampuan Pengolahan Pengangkutan (ton/hari)	78,706	95,020	100,4	119,57	125,30
	Jumlah Sampah ditangani (ton)	78,706	95,020	100,4	119,57	122,47
	Persentase Terhadap Total Timbunan Sampah (%)	50,66	24,81	16,00	19,00	18,70
TOTAL SAMPAH TERTANGANI	Kemampuan Pengolahan Pengangkutan (ton/hari)	78,706	95,020	208,731	222,398	213,97145
	Jumlah Sampah ditangani (ton)	78,706	95,90	202,591	219,541	207,6768
	Persentase Terhadap Total Timbunan Sampah	50,66	50,94	32,00	34,00	31,71

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan DLH Kab Klaten, 2024

Sampai tahun 2024, Kabupaten Klaten memiliki 62 kelompok bank sampah, dengan 23 diantaranya dibangun oleh pemerintah daerah dan sisanya



terbentuk secara mandiri. Selain itu, terdapat 38 unit TPS3R skala kecamatan dan desa. TPS3R skala kecamatan memiliki kapasitas pengolahan sekitar 25 ton per 30 hari (0,83 ton per hari), sementara bank sampah hanya mampu mengolah 50-60 kg sampah per hari. Data ini menunjukkan bahwa meskipun infrastruktur pengolahan sampah telah tersedia, kapasitas pengelolaan yang ada masih jauh dari memadai jika dibandingkan dengan volume timbulan sampah yang terus meningkat seiring pertumbuhan jumlah penduduk.



Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Klaten. tahun 2024

Gambar 2.15 Jumlah Penanganan Sampah yang Tertangani Kabupaten Klaten Tahun 2020-2024

Dalam menghadapi dampak perubahan iklim global, Kabupaten Klaten menunjukkan komitmen kuat untuk mendukung penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK), selaras dengan target minimum Rencana Pembangunan Rendah Karbon Daerah (RPRKD) Provinsi Jawa Tengah dan skenario pembangunan rendah karbon nasional dari BAPPENAS. Secara sektoral, potensi kontribusi penurunan emisi GRK Kabupaten Klaten adalah sebagai berikut:

1. Sektor Energi

Menyumbang emisi terbesar, khususnya dari konsumsi listrik (82,72% dari total emisi energi). Penurunan emisi dilakukan melalui efisiensi energi, penggunaan lampu hemat energi, panel surya di fasilitas publik seperti Pasar Gedhe, serta dorongan pemanfaatan Energi Baru Terbarukan (EBT). Target kontribusi EBT dalam bauran energi primer ditetapkan sebesar 21,32%.

2. Sektor Limbah

Kontribusi penurunan emisi dicapai melalui pengelolaan sampah berbasis teknologi dan komunitas (reduce-reuse-recycle), serta program pengolahan sampah organik menjadi kompos atau energi. Program TPA ramah lingkungan menjadi bagian dari intervensi ini.





3. Sektor Pertanian, Kehutanan dan Lahan (AFOLU)

Emisi dari metana (CH₄) dan dinitrogen oksida (N₂O) terutama berasal dari kegiatan pertanian dan peternakan. Upaya penurunan dilakukan melalui praktik pertanian rendah emisi, integrasi agroforestry, serta pelestarian dan rehabilitasi kawasan hutan. Potensi hutan negara dan produksi yang masih luas memberi peluang besar dalam penyerapan karbon dan pelestarian lingkungan.

4. Sektor Transportasi

Meski kontribusinya lebih kecil dibanding sektor energi dan pertanian, efisiensi transportasi publik serta dorongan kendaraan listrik di masa depan juga menjadi bagian dari strategi jangka panjang.

Upaya penurunan emisi di Kabupaten Klaten menunjukkan arah yang positif, namun masih memerlukan peningkatan pada aspek kolaborasi lintas sektor, inovasi kebijakan berbasis bukti, serta edukasi publik untuk menciptakan kesadaran kolektif dalam menjaga lingkungan. Konsistensi dalam pemanfaatan potensi hutan, pemenuhan target energi bersih, serta reformasi sistem pertanian menjadi kunci untuk mendukung pembangunan berkelanjutan dan memperkuat ketahanan iklim daerah.

Tabel 2.16
Hasil Perhitungan GRK Kabupaten Klaten Tahun 2021-2023
Berdasarkan Sumber Emisi

No	Kategori	Emisi (Ton/tahun)			
		CO ₂	CH ₄	N ₂ O	CO ₂ req
	Tahun 2021				
1	Penggunaan Energi	1.463.485,79	34,76	2,09	1.464.862,31
2	IPPU				
3	AFOLU	21.365,35	6.655,94	5,76	162.927,00
4	Pengolahan Limbah	6.349,00			6.349,00
	Total 2021	1.491.200,14	6.690,70	7,85	1.634.138,31
	Tahun 2022				
1	Penggunaan Energi	1.221.351,55	73,33	4,4	522.726,36
2	IPPU				
3	AFOLU	3.884	4.789,20	4,619	105.887,48
4	Pengolahan Limbah	49.231,44			
	Total 2022	1.274.466,99	4.862,53	9,017	628.613,84
	Tahun 2023				
1	Penggunaan Energi	1.254.395,50	73,51	4,41	1.257.306,55
2	IPPU				
3	AFOLU ¹	4.415,40	4.540,74	4,57	100.656,22
4	Pengolahan Limbah	88.530,00			88.5300
	Total 2023	1.347.340,90	4.614,25	8,985	1.446.492,77

Sumber: Dokumen Investasrisasi Gas Rumah Kaca Kabupaten Klaten Tahun 2022

Keterangan: 1 tidak dilakukan perhitungan pada sektor penggunaan lahan



Energi yang menjadi pokok bahasan dalam kegiatan inventarisasi GRK Kabupaten Klaten tahun 2024 adalah bahan bakar minyak dan listrik. Emisi pada sektor energi sangat diperlukan oleh kondisi sosial ekonomi masyarakat sekitar. Padatnya arus lalu-lintas yang melewati Kabupaten Klaten berpotensi menyumbang emisi. Hal ini tidak dapat dihindari sebab sebagian besar kendaraan yang melintas merupakan kendaraan logistik yang diperuntukkan sebagai distributor kebutuhan logistik antar daerah. Selain itu jalur lintas Solo-Joga juga menjadi jalur wisata yang mana kendaraan pribadi ataupun umum yang digunakan juga berpotensi menjadi sumber emisi. Kabupaten Klaten juga dilewati jalur kereta api lintas selatan yang menghubungkan Kota Surakarta dengan Daerah Istimewa Yogyakarta. Padatnya arus kereta api diesel (KRD) dengan kereta api dengan lokomotif General Elektrik (GE) diduga juga menjadi salah satu sumber emisi. Pada tahun 2021 Kementerian Perhubungan telah meluncurkan Kereta Rel Listrik (KRL) sebagai pengganti Kereta Rel Diesel (KRD) Prames (Prambanan Express) jurusan Surakarta-DIY.

Total emisi yang dibebankan terhadap lingkungan dari sektor penggunaan energi pada tahun 2023 adalah sebesar 1.257.306,55 ton CO_{2eq} dengan rincian emisi CO₂ sebesar 1.254.395,5 ton/ tahun, emisi CH₄ sebesar 73,51 ton/ tahun dan emisi N₂O sebesar 4,41 ton/ tahun.

Tabel 2.17
Hasil Inventarisasi Sektor Penggunaan Energi Tahun 2023

No	Kategori	Emisi (Ton/tahun)			CO ₂ _{req} (Ton/tahun)
		CO ₂	CH ₄	NO ₂	
1	Transportasi				
	Jalan Raya*	518.125,36	73,20	4,39	521.024,09
	Kereta Api	2.305,66	0,31	0,02	2.317,98
2	Listrik	733.964,48	0,00	0,00	733.964,48
	Total	1.254.395,50	73,51	4,41	1.257.306,55

Sumber: Dokumen Inventarisasi Gas Rumah Kaca Kabupaten Klaten Tahun 2022

Keterangan: *Data aktivitas jalan raya diambil dari data penjualan BBM per tahun.

a) Sektor Pertanian, Kehutanan dan Penggunaan Lahan (AFOLU)

Emisi gas metana sangat dipengaruhi oleh aktivitas pertanian, pengolahan lahan dan peternakan. Emisi GRK pada sektor pertanian dihasilkan dari beberapa aktivitas antara lain peternakan, budidaya, pengolahan lahan beserta penggunaan pupuk. Emisi yang dihasilkan dari kegiatan peternakan pada umumnya adalah eksresi hewan ternak. Peternakan dan pertanian merupakan kegiatan simbiosis antar satu dengan lainnya. Pengolahan kotoran ternak menjadi pupuk kandang dapat difungsikan sebagai pupuk dan sisa bahan organik dari hasil pertanian dapat difungsikan substitusi pakan ternak. Dari hasil perhitungan emisi GRK pada sektor AFOLU didapatkan hasil sebagai berikut



Tabel 2.18
Hasil Inventarisasi Sektor AFOLU Tahun 2023

No	Sektor	Nilai Emisi (Ton/tahun)			CO ₂ eq (Ton/ tahun)
		CO ₂	CH ₄	NO ₂	
1	Peternakan				
A	CH ₄ Fermentasi Enterik	0,00	4.148,07	0,00	87.109,37
B	CH ₄ Pengolahan Kotoran Ternak	0,00	390,62	0,00	8.203,08
C	N ₂ O langsung dari pengolahan kotoran ternak	0,00	0,00	3,82	1.185,53
D	N ₂ O tidak langsung dari pengolahan kotoran ternak	0,00	0,00	0,75	231,12
2	Pertanian				
A	Pengolahan Sawah	0,00	2,05	0,00	43,13
B	Aplikasi Pupuk Urea	4.415,40	0,00	0,00	4.415,40
3	Penggunaan lahan	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total	4.415,40	4.540,74	4,57	101.187,62

Sumber: Dokumen Inventarisasi Gas Rumah Kaca Kabupaten Klaten Tahun 2024

b) Sektor Pengolahan Limbah

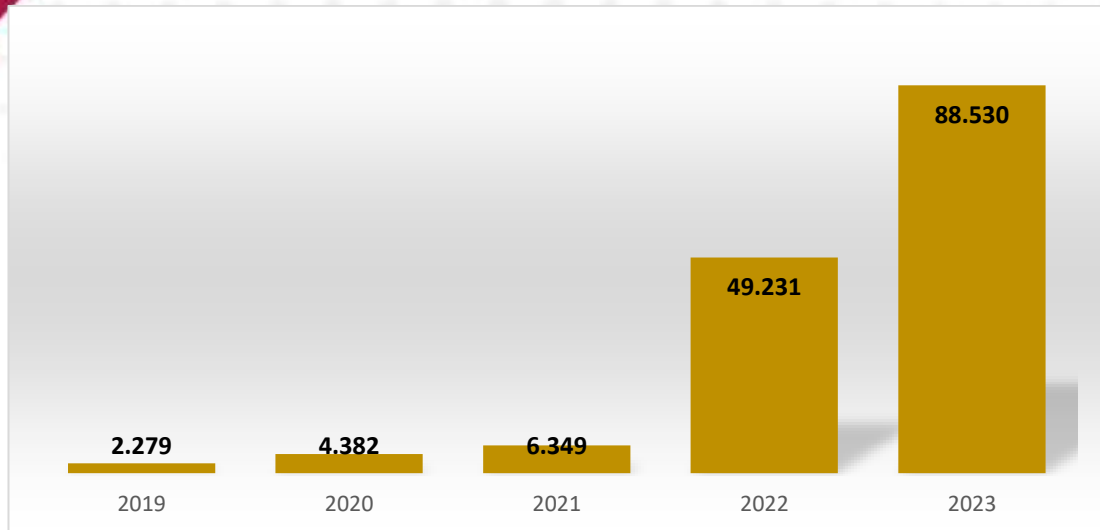
Sektor Pengolahan Limbah yang menjadi bahasan dalam Inventarisasi GRK adalah besaran gas metana yang dihasilkan dari kegiatan landfill TPA Troketon. Limbah yang ditampung di TPA Troketon merupakan limbah padat domestik. Komposisi sampah di TPA Troketon didominasi oleh sampah sisa makanan yaitu sebesar 67,42%. Sampah sisa makanan tergolong sampah yang mudah mengalami degradasi karbon sehingga diduga akan menimbulkan gas metana lebih besar.

Tabel 2.19
Komposisi Sampah di TPA Troketon

No	Sampah	Komposisi (%)
1	Food Waste	67,42
2	Garden Waste	2,00
3	Textile	0,42
4	Glass, Plastic, & Metal Waste	15,89
5	Paper Waste	10,46
6	Wood Waste	3,82

Sumber: Dokumen GRK Kabupaten Klaten Tahun 2024

Berdasarkan hasil perhitungan estimasi emisi GRK TPA Troketon pada tahun 2023 capaiannya 88.530 ton CO₂eq/ tahun menunjukkan peningkatan dari tahun sebelumnya.



Sumber: Dokumen GRK Kabupaten Klaten Tahun 2024

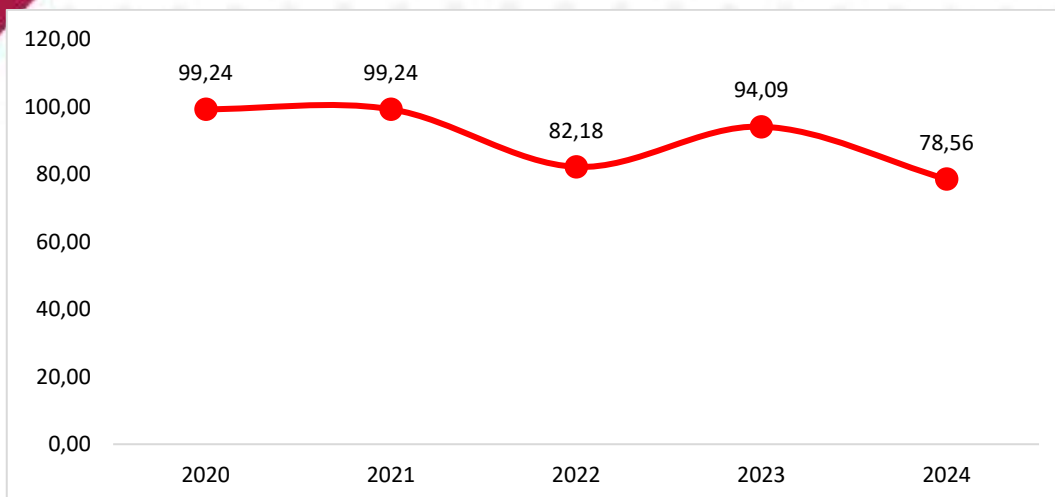
Gambar 2.16 Hasil Inventarisasi GRK Landfill TPA Troketon Tahun 2019-2023

Kabupaten Klaten berkomitmen dalam mendukung upaya penurunan emisi gas rumah kaca melalui penguatan sektor energi, pengelolaan lahan berkelanjutan, serta pemanfaatan limbah yang lebih ramah lingkungan.

2.2.6. Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim

Bencana yang ada di Kabupaten Klaten berupa banjir, gempa bumi dan tanah longsor yang terjadi pada beberapa wilayah di Kabupaten Klaten. Bencana ini terjadi karena beberapa faktor, baik faktor alam maupun kelalaian manusia. Wilayah di Kabupaten Klaten termasuk daerah rawan gempa bumi dengan klasifikasi rendah, menengah hingga tinggi. Sebagian wilayah Kecamatan Polanharjo, Delanggu, Juwiring dan Wonosari termasuk daerah rawan bencana gempa bumi tinggi. Jalur Evakuasi Bencana adalah jalan yang dikhususkan untuk jalur evakuasi bila terjadi bencana, berikut jalur bencana:

- Jalur Evakuasi Bencana letusan gunung api terdapat di Kecamatan Jatinom, Kecamatan Jogonalan, Kecamatan Karangnongko, Kecamatan Kebonarum, Kecamatan Kemalang, Kecamatan Klaten Selatan, Kecamatan Manisrenggo, Kecamatan Ngawen dan Kecamatan Prambanan.
- Jalur Evakuasi Bencana gerakan tanah, terdapat di: Kecamatan Bayat, Kecamatan Cawas, Kecamatan Ceper, Kecamatan Gantiwarno, Kecamatan Jogonalan, Kecamatan Juwiring, Kecamatan Kalikotes, Kecamatan Karangdowo, Kecamatan Klaten Selatan, Kecamatan Manisrenggo, Kecamatan Pedan, Kecamatan Prambanan, Kecamatan Trucuk, Kecamatan Wedi dan Kecamatan Wonosari.
- Jalur Evakuasi Bencana banjir, terdapat di Kecamatan Bayat, Kecamatan Cawas, Kecamatan Ceper, Kecamatan Gantiwarno, Kecamatan Jogonalan, Kecamatan



Sumber: BPBD Kab. Klaten, 2024

Gambar 2.18 Indeks Resiko Bencana (IRB) Kabupaten Klaten Tahun 2020-2024

Indeks risiko bencana merupakan tingkat risiko bencana tiap-tiap kabupaten/kota sesuai dengan bahaya (*hazard*) yang dimiliki dan gabungan dari bahaya (*multi hazard*) tersebut dengan tingkatan 1 untuk rendah, 2 untuk sedang dan 3 untuk tinggi. Dari hasil kajian resiko bencana didapatkan hasil sebagai berikut:

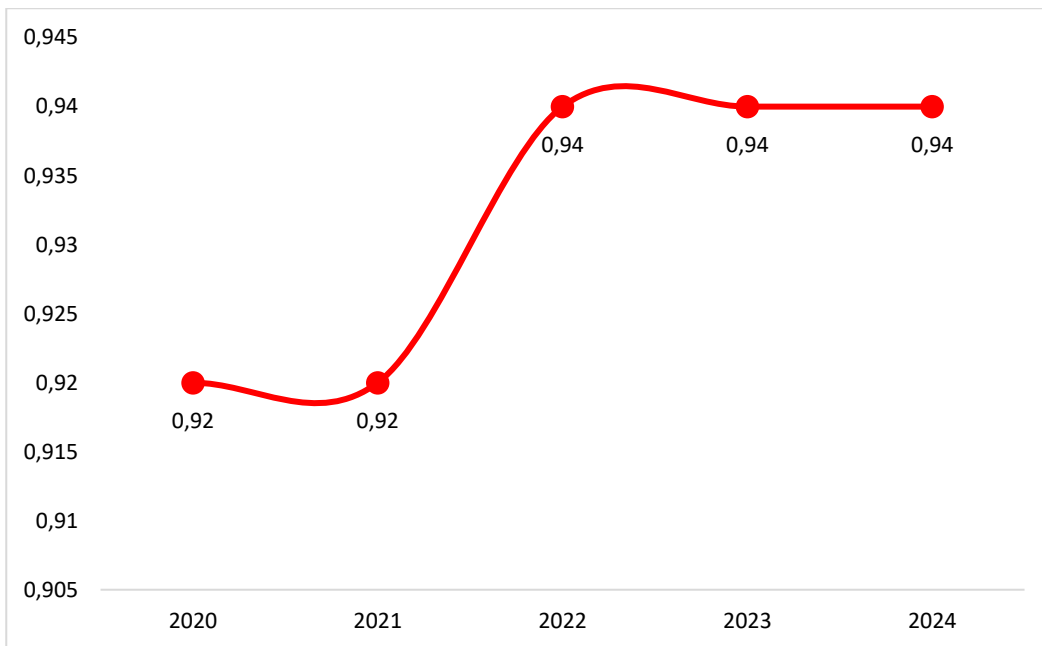
Tabel 2.20 Hasil Kajian Resiko Bencana Kabupaten Klaten

Kategori	Titik Wilayah Rawan
Tingkat ancaman tanah longsor (Kategori ancaman sedang)	Kecamatan Bayat (Desa. Paseban), Kecamatan Karangdowo (Desa. Demangan), Kecamatan Kemalang (Desa. Tegalmulyo dan Desa. Talun).
Tingkat ancaman banjir (Kategori ancaman tinggi)	Kecamatan Wonosari (Desa. Bendungan), Kecamatan Ngawen (Desa. Gatak), Kecamatan Jogonalan (Desa. Joton), Kecamatan Cawas (Desa. Pogung) dengan total sekitar 10 kecamatan dan 73 desa.
Tingkat ancaman gempa bumi (Kategori ancaman sedang)	hampir di semua wilayah rawan terutama di daerah prambanan dan cawas.
Tingkat ancaman letusan gunung api (Kategori ancaman tinggi)	hampir semua wilayah di Kecamatan Kemalang, Kecamatan Manisrenggo dan Kecamatan Karangnongko.
Tingkat Ancaman cuaca ekstrem/ puting beliung (Kategori ancaman tinggi)	Kecamatan Prambanan (Desa. Dukuh, Desa. Kabondalemlor), Kecamatan Kalikotes (Desa. Gatak, Desa. Gemblegan), Kecamatan Trucuk (Desa. Bero), Kecamatan Jogonalan (Desa. Joton, Desa. Gondangan, Desa. Nengahan, Desa. Somopuro, Desa. Gatak, Desa. Sumyang, Desa. Tangkisan pos, Desa. Titang), Kecamatan Cawas (Desa. Pakisan), Kecamatan Ngawen (Desa. Kwaren, Desa. Manjungan), Kecamatan Wedi (Desa. Birit, Desa. Sukorejo).

Sumber : BPBD Kab. Klaten, 2023



Upaya untuk mengukur kapasitas penanggulangan bencana di daerah dilakukan melalui Indeks Ketahanan Daerah (IKD). IKD dihitung berdasarkan 7 prioritas, yakni: (1) Perkuatan kebijakan dan kelembagaan, (2) Pengkajian risiko dan perencanaan terpadu, (3) Pengembangan sistem informasi, diklat dan logistik, (4) Penanganan tematik kawasan rawan bencana, (5) Peningkatan efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana, (6) Penguatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana dan (7) Pengembangan sistem pemulihan bencana. Nilai Indeks Ketahanan Daerah (IKD) Kabupaten Klaten Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada grafik berikut.



Sumber : BPBD Kab. Klaten, 2024

Gambar 2.19 Nilai Indeks Ketahanan Daerah (IKD) Tahun 2020-2024

Potensi ancaman bencana di Kabupaten Klaten diperkirakan akan semakin meluas seiring meningkatnya kerentanan masyarakat, khususnya di sektor ekonomi, pendidikan, pengelolaan lingkungan hidup dan penataan ruang. Sepanjang tahun 2020 hingga 2024, jumlah kejadian bencana menunjukkan tren peningkatan yang signifikan, dengan total 548 kejadian tercatat pada tahun 2024. Peningkatan ini sebagian besar dipicu oleh faktor alam yang sifatnya tidak dapat diprediksi, sehingga diperlukan penguatan kapasitas dan ketahanan daerah dalam menghadapi risiko bencana di masa mendatang. Informasi lebih lanjut mengenai jumlah dan jenis kejadian bencana di Kabupaten Klaten selama periode tersebut disajikan dalam tabel berikut.



Tabel 2.21
Kejadian Bencana di Kabupaten Klaten 2020-2024

Jenis Bencana	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Banjir	10	6	42	26	15
Tanah longsor	8	12	46	35	8
Angin Kencang	116	73	121	96	297
Kekeringan	1	1	1	1	1
Letusan Gunung api	1	0	0	1	0
Kebakaran	4	8	5	317	226
Gempa Bumi	0	0	1	1	1
Jumlah	140	100	216	477	548

Sumber:BPBD Kab. Klaten, 2024 (Pusdalops, Data Laporan kejadian)

Kejadian bencana juga merugikan bagi pihak yang terdampak dan menjadi korban bencana. Kerugian yang paling dapat dirasakan adalah segi material. Berikut data nilai kerusakan yang diakibatkan oleh berbagai jenis bencana di Kabupaten Klaten dalam rupiah.

Tabel 2.22
Nilai Kerusakan Akibat Bencana di Kabupaten Klaten 2020-2024

Jenis Bencana	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Banjir	10.000.000	-	3.840.977.124	-	-
Tanah longsor	10.000.000	-	3.927.977.124	8.583.361.000	88.610.000
Angin Kencang	5.000.000	10.000.000	2.119.302.124	8.583.861.000	609.150.000
Kekeringan	-	-	-	-	-
Letusan Gunung api	-	-	-	-	-
Kebakaran	56.000.000	-	194.400.000	8.562.041.000	338.450.000
Gempa Bumi	-	-	-	75.000.000	20.000.000
Jumlah	81.000.000	10.000.000	10.082.656.372	25.804.263.000	1.056.210.000

Sampai dengan tahun 2024 sudah terdapat 21 Desa Tangguh Bencana yang pembentukannya menggunakan APBD Kabupaten Klaten, APBD Provinsi dan oleh Perguruan Tinggi dalam hal ini adalah Universitas Gajah Mada Yogyakarta. Berikut data desa tangguh bencana yang sudah terbentuk di Kabupaten Klaten sampai dengan tahun 2024.



Tabel 2.23
Desa Tangguh Bencana di Kabupaten Klaten Tahun 2024

No.	Desa	Kecamatan	Tahun	Sumber Pendanaan
1	Tegalmulyo	Kemalang	2017	APBD Kabupaten
2	Ngandong	Gantiwarno	2018	APBD Kabupaten
3	Sidorejo	Kemalang	2019	APBD Kabupaten
4	Balak	Cawas	2018	APBD Kabupaten
5	Bawak	Cawas	2019	APBD Kabupaten
6	Mlese	Gantiwarno	2019	APBD Provinsi
7	Sengon	Prambanan	2020	UGM
8	Somopuro	Jogonalan	2020	APBD Kabupaten
9	Towangsan	Gantiwarno	2020	APBD Kabupaten
10	Paseban	Bayat	2021	APBD Provinsi
11	Balerante	Kemalang	2021	APBD Kabupaten
12	Kragilan	Jogonalan	2021	APBD Kabupaten
13	Joho	Prambanan	2022	APBD Kabupaten
14	Karanganom	Klaten Utara	2022	APBD Kabupaten
15	Karanglo	Polanharjo	2022	APBD Kabupaten
16	Kupang	Karangdowo	2022	APBD Kabupaten
17	Balerante	Kemalang	2022	APBD Kabupaten
18	Pasung	Wedi	2023	APBD Kabupaten
19	Kalikebo	Trucuk	2023	APBD Kabupaten
20	Demakijo	Karangnongko	2023	APBD Kabupaten
21	Kingkang	Wonosari	2023	APBD Kabupaten

Sumber: BPBD Kab. Klaten, 2024

Salah satu potensi bencana di Kabupaten Klaten adalah erupsi Gunung Merapi, sehingga dibutuhkan jalur evakuasi yang memadai untuk mengamankan warga lereng Merapi saat terjadi peningkatan aktivitas vulkanik. Saat ini, Kabupaten Klaten memiliki jalur evakuasi sepanjang 63,81 km yang mengarah ke tiga Tempat Evakuasi Akhir (TEA), yaitu di Kebondalem Lor (Prambanan), Malangjiwan (Kebonarum) dan Demakijo (Karangnongko). Mengingat status Gunung Merapi yang masih aktif, perbaikan dan penanganan jalur evakuasi menjadi prioritas, namun memerlukan dukungan pendanaan dari pemerintah pusat dan provinsi melalui skema DAK infrastruktur dan bantuan keuangan (Bankeu) provinsi. Beberapa ruas jalur evakuasi yang telah dibangun masih membutuhkan penambahan sarana keselamatan jalan, seperti marka, lampu penerangan jalan (PJU), cermin cekung dan guardrail. Data rinci terkait kondisi dan sebaran kerusakan jalur evakuasi tersedia per ruas jalan.



Tabel 2.24
Kondisi Jalur Evakuasi Merapi Berdasarkan Ruas Jalan
Kabupaten Tahun 2024

Nama Ruas	Kondisi jalan (km)			
	Baik	Sedang	Rusak Ringan	Rusak Berat
Dengok-Nangsri	3,7	0,20	-	-
Kepurun-Panggung	-	1,98	1,60	-
Manisrenggo-Genengsari	2,63	-	-	-
Nangsri-Tanjungsari	1,55	-	-	-
Ngemplakseneng-Batas DIY	1,83	-	-	-
Genengsari-Ngemplakseneng	1,70	-	-	-
Panggung-Balerante	1,90	0,20	1,79	-
Dompol-Kaliwuluh	1,15	-	2,00	-
Dompol-Kendalsari	-	0,06	0,80	0,80
Kaliwuluh-Deles	4,74	0,01	-	-
Mipitan-Pasar Kembang	1,49	-	-	-
Pasar Kembang-Dompol	3,73	-	-	-
Gemampir-Jiwan	3,09	-	-	-
Gorosan-Gemampir	0,86	-	-	-
Karangnongko-Gorosan	0,65	0,80	-	-
Suwono-Tegalmulyo	6,62	-	-	-
Pasar Kembang-Kadilaju	-	0,26	0,71	-
Manisrenggo-Kadilaju	2,50	3,11	-	-
Sendanglebak-Puluhwatu	0,82	-	-	-
Basin-Mipitan	4,29	-	-	-
Mipitan-Kadilaju	2,02	0,06	-	-
Karangnongko-Sendanglebak	0,93	0,15	-	-

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Klaten, 2024

Dalam rangka mendukung pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sub urusan bencana, Pemerintah Kabupaten Klaten telah melaksanakan berbagai upaya penguatan sistem mitigasi dan kesiapsiagaan bencana, antara lain:

- Pemasangan Early Warning System (EWS) berupa CCTV pemantau aliran sungai pada dua titik strategis, yaitu di Jembatan Kragilan, Kecamatan Gantiwarno dan Jembatan Talang, Kecamatan Bayat;
- CCTV pemantau aktivitas Gunung Merapi yang terpasang di Posko Induk Relawan 907, Desa Balerante, Kecamatan Kemalang, dimana asilitas ini merupakan bantuan dari BPBD Provinsi Jawa Tengah;
- Alat pemantau lahar dingin yang berada di kompleks Kantor BPBD Kabupaten Klaten, sebagai bagian dari aset kerja sama antara JICA Jepang dan Kementerian PUPR;



- Pembangunan dan penandaan jalur-jalur evakuasi di kawasan rawan bencana;
- Telah terbentuk Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB) di wilayah dengan tingkat rawan bencana yang tinggi yaitu di Kecamatan Kemalang dan Gantiwarno sebanyak 60 sekolah di jenjang pendidikan dasar dan menengah;
- Pelaksanaan kegiatan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) kebencanaan secara masif kepada masyarakat di wilayah rawan bencana;
- Peningkatan kapasitas masyarakat melalui pelatihan mitigasi bencana, pembentukan dan penguatan Desa Tangguh Bencana (Destana), serta optimalisasi kinerja Kecamatan Tangguh Bencana (Kencana);
- Penguatan jejaring kelembagaan dengan melibatkan instansi pemerintah, sektor swasta dan unsur relawan kebencanaan guna memperkuat koordinasi dan respons cepat saat terjadi bencana.

Penanganan bencana kebakaran di Kabupaten Klaten masih menghadapi berbagai kendala yang memerlukan perhatian. Tingginya angka kejadian kebakaran serta belum optimalnya pemenuhan waktu tanggap oleh petugas pemadam kebakaran menjadi permasalahan utama. Saat ini, Kabupaten Klaten hanya memiliki satu kantor pelayanan pemadam kebakaran yang belum mampu menjangkau seluruh wilayah, khususnya area yang berjarak cukup jauh.

Pada tahun 2024, terdapat 300 wilayah di Kabupaten Klaten yang tergolong sebagai daerah rawan kebakaran berdasarkan angka kejadian yang tercatat. Penanganan bencana kebakaran masih menghadapi berbagai kendala yang memerlukan perhatian serius. Tingginya frekuensi kebakaran dan belum optimalnya waktu tanggap petugas menjadi permasalahan utama. Saat ini, Kabupaten Klaten hanya memiliki satu kantor pemadam kebakaran, yang belum mampu menjangkau seluruh wilayah, terutama daerah yang cukup jauh. Penambahan pos pemadam kebakaran diharapkan dapat memperluas cakupan layanan dan mempercepat respons penanganan. Namun, keterbatasan jumlah pos, kurangnya tenaga personel, serta minimnya sarana dan prasarana pendukung masih menjadi tantangan yang perlu segera diatasi untuk meningkatkan kapasitas layanan ke depan.

Tabel 2.25
Daerah Rawan Kebakaran Berdasar Angka Kejadian Kebakaran
Tahun 2020-2024

No	Kecamatan	Tahun Ke-				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Ceper	15	13	13	68	31
2	Klaten Utara	17	13	15	43	37
3	Trucuk	11	14	8	32	12



No	Kecamatan	Tahun Ke-				
		2020	2021	2022	2023	2024
4	Pedan	9	7	4	28	21
5	Wonosari	4	6	3	25	13
6	Klaten Selatan	6	5	5	22	27
7	Jogonalan	5	6	7	20	14
8	Delanggu	4	4	6	20	16
9	Ngawen	5	4	4	17	15
10	Klaten Tengah	5	14	9	15	13
11	Juwiring	24	22	10	15	13
12	Bayat	0	5	3	15	7
13	Kalikotes	5	3	5	11	5
14	Prambanan	2	3	3	11	6
15	Jatinom	2	1	0	10	11
16	Tulung	2	0	1	10	6
17	Cawas	4	2	2	10	5
18	Wedi	3	4	3	10	10
19	Karanganom	3	6	1	9	11
20	Karangdowo	4	0	2	7	5
21	Polanharjo	1	2	2	7	4
22	Gantiwarno	3	1	0	4	8
23	Kebonarum	3	3	1	3	5
24	Karangnongko	0	0	0	3	1
25	Manisrenggo	2	3	2	1	4
26	Kemalang	1	3	0	1	0
	JUMLAH	140	144	109	417	300

Sumber: Satpol PP Kabupaten Klaten, 2025

Angka kejadian kebakaran di lima tahun terakhir bersifat fluktuatif, dengan kenaikan angka kejadian yang cukup signifikan di tahun 2023. Hal ini disebabkan karena musim kemarau panjang dan peningkatan suhu permukaan (El Nino) berdampak pada kekeringan parah disertai dengan potensi peningkatan kebakaran yang mana kejadian kebakaran di tahun 2023 sebagian besar adalah kebakaran hutan/ lahan.

Tingkat waktu tanggap (*response time rate*) Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) di Kabupaten Klaten mengalami fluktuatif selama periode 2020–2024. Pada tahun 2020 tercatat sebesar 63,00%, menurun sebesar 60,83% pada 2021, kemudian meningkat menjadi 67,00% pada tahun 2022, namun pada 2023 kembali menurun menjadi 57,20%, sebelum akhirnya naik signifikan menjadi 83,33% ditahun 2024. Sementara itu, waktu rata-rata tanggap penanganan kebakaran sempat mencapai 22,89 menit, namun terus mengalami perbaikan hingga tahun 2024. Data ini mencerminkan adanya peningkatan layanan, meskipun masih diperlukan upaya untuk menjaga kestabilan kinerja respon di seluruh wilayah.



Selengkapnya data tanggap bencana (kebakaran) dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.26
Tanggap Bencana (Kebakaran) Kabupaten Klaten Tahun 2020-2024

Indikator	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/kota	%	100	100	100	100	100
Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	%	63,00	60,83	67	57,20	83,33
Waktu tanggap (response Time) penanganan kebakaran	menit	14,9	13,6	22,56	22,89	15,97

Sumber : Satpol PP Kab. Klaten, 2025

Realisasi pencapaian SPM ketentraman dan ketertiban umum dengan indikator persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran pada tahun 2020-2024 capaiannya sudah 100%. Indikator persentase jumlah penduduk yang memperoleh layanan akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran perda dan perkara pada tahun 2020 tercatat 92%, meningkat menjadi 100% di tahun 2021 sampai dengan tahun 2024. Terkait dengan capaian indikator SPM kebencanaan, indikator jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana tahun 2024 sudah tercapai 100%. Capaian indikator jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana dan jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana masing-masing sudah mencapai 100% di tahun 2024. Berikut realisasi capaian SPM urusan Ketentraman dan Ketertiban umum sebagai berikut.

Tabel 2.27
Realisasi Capaian SPM Uruan Ketentraman dan Ketertiban Umum Kabupaten Klaten Tahun 2020-2024

No	Jenis pelayanan dasar	Indikator	Satuan	Realisasi Capaian SPM Tahun				
				2020	2021	2022	2023	2024
1.	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	%	100	100	100	100	100
2.	Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum	Persentase jumlah penduduk yang memperoleh layanan akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran perda dan perkara	%	92	100	100	100	100



No	Jenis pelayanan dasar	Indikator	Satuan	Realisasi Capaian SPM Tahun				
				2020	2021	2022	2023	2024
3.	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	%	100	100	100	100	100
4.	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	%	100	100	100	100	100
5.	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	%	100	100	100	100	100

Sumber : Satpol PP dan BPBD Kab Klaten, 2025

2.2.7. Demografi

Berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten tahun 2024, jumlah penduduk tercatat sebanyak 1.302.648 jiwa, terdiri dari 647.853 laki-laki dan 654.795 perempuan. Dalam lima tahun terakhir (2020-2024), jumlah penduduk terus mengalami peningkatan. Laju pertumbuhan penduduk tahun 2023-2024 sebesar 0,46%, sedikit menurun dibandingkan laju 2022–2023 yang sebesar 0,32%.

Persebaran penduduk cenderung merata di seluruh kecamatan. Kecamatan dengan jumlah penduduk terbanyak adalah Trucuk (80.923 jiwa), disusul Ceper (65.918 jiwa), sedangkan yang terendah adalah Kebonarum (19.973 jiwa). Kepadatan penduduk rata-rata Kabupaten Klaten pada 2024 adalah .857 jiwa/km². Kecamatan dengan kepadatan tertinggi adalah Klaten Utara (4.392 jiwa/km²), disusul Klaten Tengah (4.355 jiwa/km²) dan Klaten Selatan (3.009 jiwa/km²). Kepadatan terendah tercatat di Kemalang (675 jiwa/km²).

Jumlah dan kepadatan penduduk Kabupaten Klaten terus meningkat secara bertahap, dengan distribusi penduduk yang relatif merata antar kecamatan. Peningkatan jumlah penduduk ini perlu diimbangi dengan perencanaan tata ruang, infrastruktur dan pelayanan publik yang tepat agar tidak menimbulkan tekanan terhadap lingkungan dan kualitas hidup masyarakat, terutama di wilayah dengan kepadatan tinggi. Sebaran jumlah, pertumbuhan dan kepadatan penduduk dirinci per kecamatan dapat dilihat pada tabel berikut.



Tabel 2.28
Jumlah, Pertumbuhan & Kepadatan Penduduk Kabupaten Klaten Tahun 2019-2024

No	Kecamatan	Penduduk (jiwa)						Laju Pertumbuhan Penduduk Per Tahun (%)					Luas wilayah (km ²)	Kepadatan Penduduk
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2019-2020	2020-2021	2021-2022	2022-2023	2023-2024		
1	Prambanan	52.824	54.667	51.499	52.068	52.712	53.155	3,49	-5,80	1,10	1,24	0,84	26,09	2.037
2	Gantiwarno	40.696	44.262	38.620	38.875	39.091	39.194	8,76	-12,75	0,66	0,56	0,26	26,44	1.482
3	Wedi	54.507	57.338	52.068	52.355	52.716	52.878	5,19	-9,19	0,55	0,69	0,31	26,26	2.014
4	Bayat	65.649	69.554	63.541	64.083	64.374	64.539	5,95	-8,65	0,85	0,45	0,26	42,10	1.533
5	Cawas	60.690	62.222	57.569	57.990	58.339	58.471	2,52	-7,48	0,73	0,60	0,23	35,94	1.627
6	Trucuk	81.715	82.901	79.064	79.933	80.568	80.923	1,45	-4,63	1,10	0,79	0,44	34,69	2.333
7	Kebonarum	20.935	21.467	19.835	19.868	19.911	19.973	2,54	-7,60	0,17	0,22	0,31	10,42	1.917
8	Jogonalan	61.237	63.848	58.869	59.487	59.893	60.168	4,26	-7,80	1,05	0,68	0,46	27,59	2.181
9	Manisrenggo	44.373	45.378	43.018	43.566	43.910	44.249	2,26	-5,20	1,27	0,79	0,77	30,60	1.446
10	Karangnongko	38.096	39.087	36.873	37.125	37.420	37.649	2,60	-5,66	0,68	0,79	0,61	29,49	1.277
11	Ceper	67.619	70.048	65.048	65.369	65.918	66.205	3,59	-7,14	0,49	0,84	0,44	25,77	2.569
12	Pedan	48.990	50.421	46.907	47.210	47.586	47.803	2,92	-6,97	0,65	0,80	0,46	20,00	2.390
13	Karangdowo	45.256	47.089	43.486	43.639	43.873	43.950	4,05	-7,65	0,35	0,54	0,18	30,83	1.426
14	Juwiring	61.155	60.339	58.354	58.784	59.198	59.375	-1,33	-3,29	0,74	0,70	0,30	30,90	1.922
15	Wonosari	64.770	62.900	62.816	63.370	64.063	64.387	-2,89	-0,13	0,88	1,09	0,51	33,38	1.929
16	Delanggu	43.661	42.267	42.129	42.342	42.560	42.605	-3,19	-0,33	0,51	0,51	0,11	20,03	2.127
17	Polanharjo	42.969	41.146	41.009	41.194	41.371	41.435	-4,24	-0,33	0,45	0,43	0,15	25,22	1.643
18	Karanganom	47.602	46.270	46.304	46.725	47.179	47.453	-2,80	0,07	0,91	0,97	0,58	25,62	1.852
19	Tulung	55.419	53.634	53.834	54.430	54.856	55.157	-3,22	0,37	1,11	0,78	0,55	34,44	1.602
20	Jatinom	62.312	60.171	60.296	60.752	61.526	62.064	-3,44	0,21	0,76	1,27	0,87	37,11	1.672
21	Kemalang	40.064	39.299	39.479	39.907	40.372	40.656	-1,91	0,46	1,08	1,17	0,70	60,19	675
22	Ngawen	47.368	45.860	45.853	46.144	46.325	46.330	-3,18	-0,02	0,63	0,39	0,01	18,45	2.511



No	Kecamatan	Penduduk (jiwa)						Laju Pertumbuhan Penduduk Per Tahun (%)					Luas wilayah (km ²)	Kepadatan Penduduk
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2019-2020	2020-2021	2021-2022	2022-2023	2023-2024		
23	Kalikotes	38.116	37.083	37.069	37.307	37.609	37.807	-2,71	-0,04	0,64	0,81	0,53	14,11	2.679
24	Klaten utara	49.265	48.023	47.928	48.379	48.903	49.060	-2,52	-0,20	0,94	1,08	0,32	11,17	4.392
25	Klaten tengah	42.634	41.620	41.146	41.238	41.557	41.763	-2,38	-1,14	0,22	0,77	0,50	9,59	4.355
26	Klaten selatan	45.687	43.908	43.921	44.571	44.862	45.399	-3,89	0,03	1,48	0,65	1,20	15,09	3.009
Jumlah		1.323.609	1.330.802	1.276.535	1.286.711	1.296.692	1.302.648	0,54	-4,08	0,80	0,78	0,46	701,52	1.857

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Klaten, *Data DKB Semester II Tahun 2024



a. Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur dan Jenis Kelamin

Komposisi penduduk Kabupaten Klaten tahun 2024 berdasarkan jenis kelamin terdiri dari 647.853 jiwa penduduk laki-laki dan 654.795 jiwa penduduk perempuan. Berdasarkan kelompok umur penduduk terbanyak di Kabupaten Klaten tahun 2024 terdapat pada kategori usia 40-44 tahun dengan jumlah penduduk tertinggi sebesar 99.960 jiwa sedangkan untuk kategori usia 70-74 tahun merupakan jumlah penduduk terendah sebesar 38.629 jiwa. Perkembangan jumlah penduduk diketahui bahwa penduduk pada kelompok usia produktif (15-64 tahun) sebesar 895.092 jiwa sedangkan untuk usia non produktif sebesar 407.556 jiwa.

Tabel 2.29
Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur
Kabupaten Klaten Tahun 2024

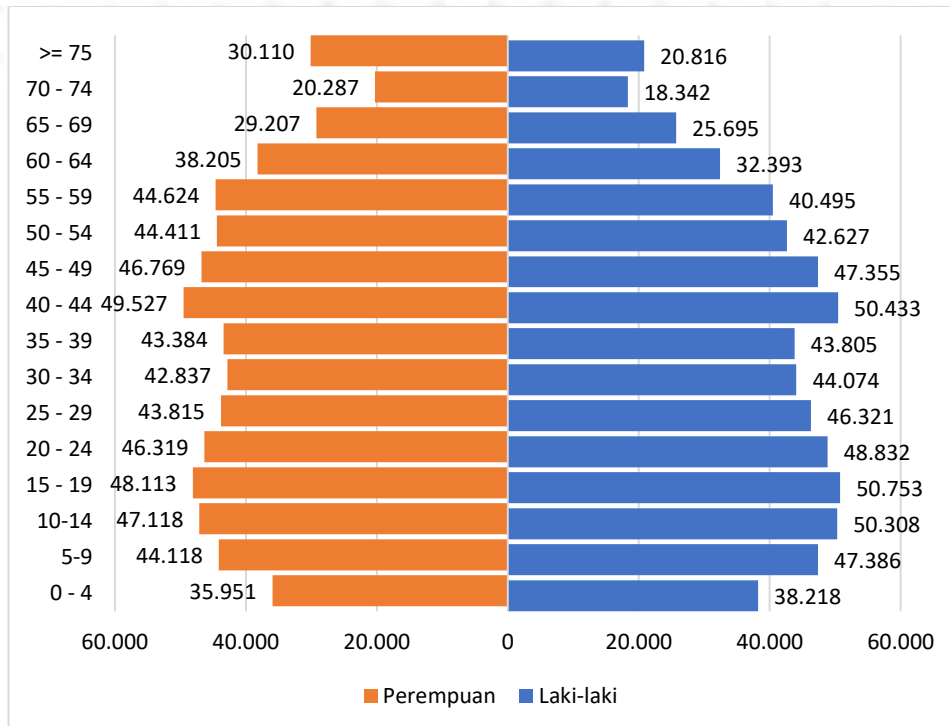
No	Usia (Tahun)	Laki-laki	Perempuan	Jumlah (jiwa)
1	0 - 4	38.218	35.951	74.169
2	5 - 9	47.386	44.118	91.504
3	10 - 14	50.308	47.118	97.426
4	15 - 19	50.753	48.113	98.866
5	20 - 24	48.832	46.319	95.151
6	25 - 29	46.321	43.815	90.136
7	30 - 34	44.074	42.837	86.911
8	35 - 39	43.805	43.384	87.189
9	40 - 44	50.433	49.527	99.960
10	45 - 49	47.355	46.769	94.124
11	50 - 54	42.627	44.411	87.038
12	55 - 59	40.495	44.624	85.119
13	60 - 64	32.393	38.205	70.598
14	65 - 69	25.695	29.207	54.902
15	70 - 74	18.342	20.287	38.629
16	>= 75	20.816	30.110	50.926
Jumlah		647.853	654.795	1.302.648

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Klaten,
*Data DKB Semester II Tahun 2024

Piramida penduduk Kabupaten Klaten membentuk piramida stasioner/ granat, dengan bentuk piramida yang cenderung mengerucut di bagian bawah dan bagian atas dapat diartikan jumlah penduduk Kabupaten Klaten memperlihatkan keseimbangan antara jumlah kelahiran dan kematian penduduk. Piramida ini juga dapat mengindikasikan pertumbuhan penduduk yang relatif stabil serta jumlah penduduk usia produktif yang lebih dominan dibandingkan penduduk usia nonproduktif. Kelompok usia produktif (usia 15-64 tahun ke atas) jumlahnya mendominasi dibandingkan jumlah penduduk kelompok usia nonproduktif (0-14 dan >65 tahun). Berdasarkan data tersebut Rasio Beban Tanggungan (RBT) berada



di angka 45,61% hal ini dapat diartikan bahwa setiap 100 penduduk usia produktif menanggung sekitar 45 penduduk usia nonproduktif.



Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Klaten,
*Data DKB Semester II Tahun 2024

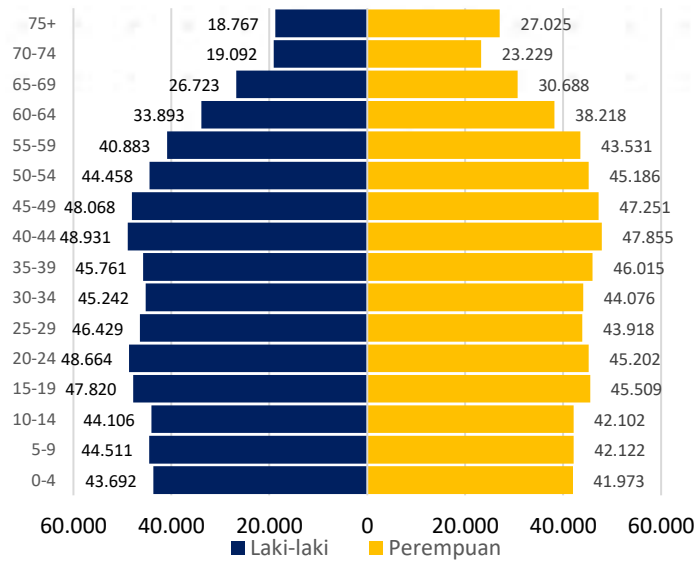
Gambar 2.20 Piramida Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Kabupaten Klaten Tahun 2024

Jumlah penduduk Kabupaten Klaten terus mengalami peningkatan dari waktu ke waktu, yang secara langsung menuntut ketersediaan fasilitas publik dan lapangan kerja yang memadai demi menjamin kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan proyeksi, jumlah penduduk Kabupaten Klaten tahun 2025 akan mencapai 1.300.940 jiwa, pada tahun 2030 akan meningkat menjadi 1.337.025 jiwa. Pada Tahun 2035 menjadi 1.365.182 jiwa, pada tahun 2040 menjadi 1.384.283 jiwa, pada Tahun 2045 menjadi 1.394.162 jiwa.

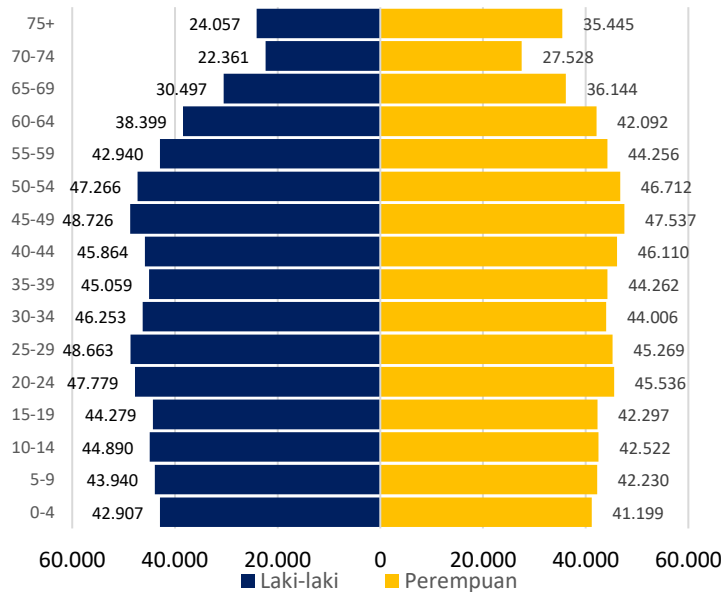
Dari sisi struktur umur, kelompok usia tidak produktif muda (0-14 tahun) menunjukkan tren menurun, sementara kelompok usia tidak produktif tua (65 tahun ke atas) justru meningkat. Pertumbuhan penduduk Kabupaten Klaten yang cenderung meningkat, disertai dengan pergeseran struktur umur ke arah populasi lansia, menjadi tantangan tersendiri dalam perencanaan pembangunan. Pemerintah daerah perlu menyiapkan strategi jangka panjang terkait penyediaan layanan publik, jaminan sosial, fasilitas kesehatan lansia, serta penciptaan lapangan kerja untuk mengimbangi kebutuhan masyarakat yang terus berkembang.



Tahun 2025



Tahun 2030



Sumber: Hasil Analisis,, 2025

Gambar 2.21 Proyeksi Penduduk Kabupaten Klaten Tahun 2025-2030

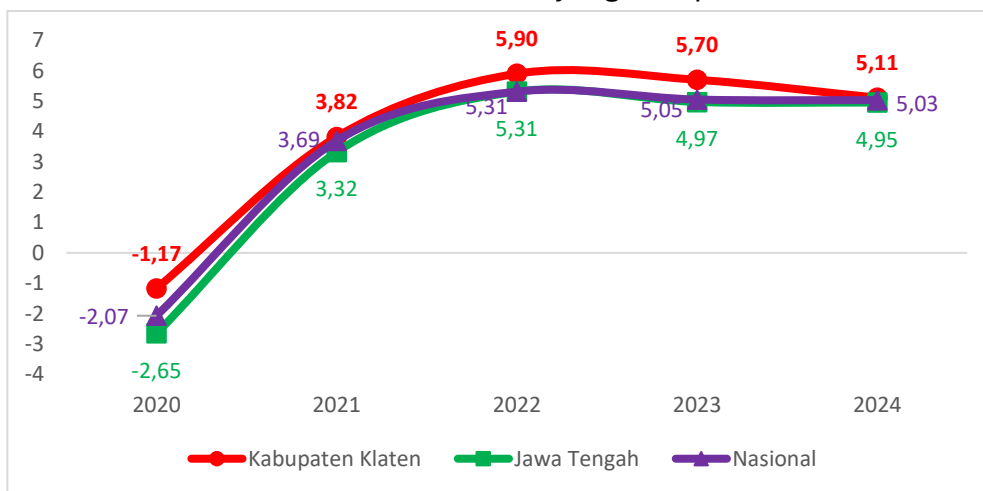


2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.2.1. Kesejahteraan Ekonomi

Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Klaten mengalami kontraksi sebesar -1,17% pada tahun 2020 akibat pandemi Covid-19. Namun, kondisi mulai membaik pada 2021 dengan pertumbuhan 3,82% dan meningkat signifikan pada tahun 2022 mencapai 5,90%. Pada tahun 2023, pertumbuhan menurun menjadi 5,70% dan kembali turun pada tahun 2024 menjadi 5,11%, disebabkan oleh tidak optimalnya proyeksi sebagian besar sektor ekonomi. Meski demikian, pertumbuhan ekonomi Klaten tetap relatif stabil dan berada di atas rata-rata Provinsi Jawa Tengah dan Nasional.

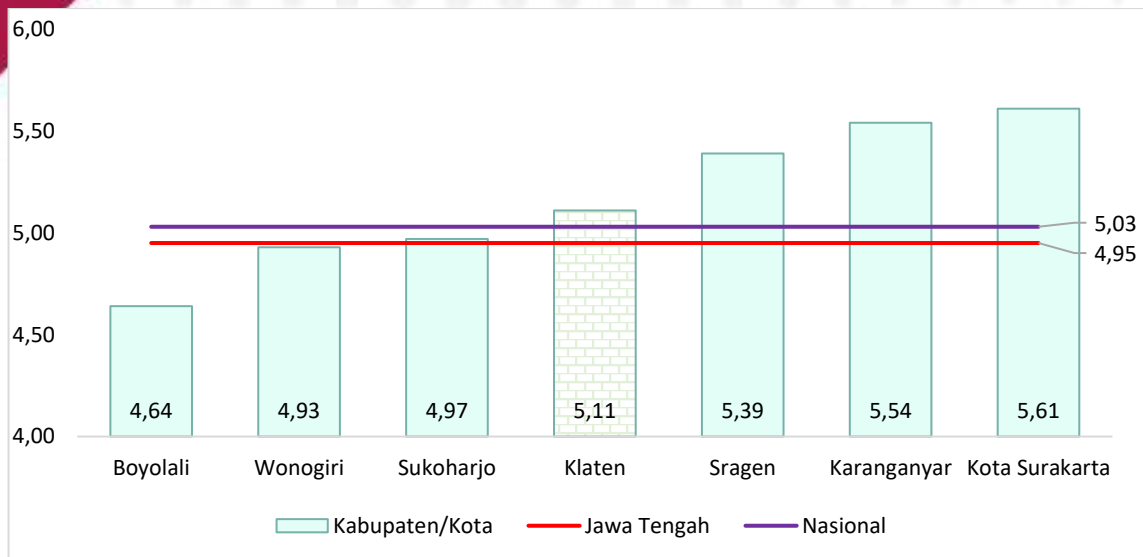
Meskipun sempat mengalami kontraksi akibat pandemi, perekonomian Kabupaten Klaten menunjukkan tren pemulihan yang cukup kuat dalam beberapa tahun terakhir. Penurunan di tahun 2023 dan 2024 menunjukkan perlunya strategi penguatan sektor-sektor produktif agar pertumbuhan dapat kembali meningkat secara berkelanjutan. Posisi pertumbuhan yang tetap berada di atas rata-rata provinsi dan nasional mencerminkan ketahanan ekonomi daerah yang cukup baik.



Sumber: BPS Kabupaten Klaten, 2025

Gambar 2.22 Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Klaten dengan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2020-2024

Pada tahun 2024, kinerja pertumbuhan ekonomi Kabupaten Klaten jika dibandingkan dengan Kabupaten/kota disekitarnya berada di peringkat keempat, Pada posisi pertama Kota Surakarta sebesar 5,61%, kemudian diikuti Kabupaten Karanganyar sebesar 5,54% dan ketiga Kabupaten Sragen sebesar 5,39%. Namun demikian pertumbuhan ekonomi Kabupaten Klaten berada di atas rata-rata Nasional sebesar 4,95% dan Provinsi Jawa Tengah sebesar 5,03%. Data selengkapnya dapat dilihat sebagaimana pada gambar sebagai berikut.



Sumber: BPS Kabupaten Klaten, 2025

Gambar 2.23 Posisi Relatif Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Klaten dengan Kabupaten/ Kota sekitarnya Tahun 2024

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Klaten pada tahun 2024 tercatat sebesar 5,11%, didorong oleh kontribusi berbagai sektor usaha. Hal ini mencerminkan adanya pemulihan dan penguatan aktivitas ekonomi pasca pandemi, yang didukung oleh kontribusi signifikan dari sektor penyediaan akomodasi dan makan minum, jasa perusahaan, konstruksi, kesehatan, serta informasi dan komunikasi. Sektor dengan kontribusi terbesar terhadap PDRB adalah Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (8,94%), diikuti Jasa Perusahaan (8,57%), Konstruksi (8,2%), Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial (7,85%), serta Informasi dan Komunikasi (7,71%). Peningkatan ini turut dipengaruhi oleh pertumbuhan lapangan usaha di sektor akomodasi, makanan dan minuman, serta konstruksi, yang didorong oleh pembangunan jalan tol dan pengembangan sektor jasa lainnya. Pembangunan infrastruktur seperti jalan tol dan tumbuhnya sektor jasa menjadi pendorong utama peningkatan tersebut. Dengan tren ini, Kabupaten Klaten memiliki potensi untuk terus meningkatkan daya saing ekonomi dan memperluas lapangan kerja jika pertumbuhan sektor-sektor unggulan tersebut dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan.

Tabel 2.30
Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Klaten Menurut Lapangan Usaha Tahun 2020-2024

Lapangan Usaha	Laju Pertumbuhan PDRB (%)				
	2020	2021	2022	2023	2024*
Pertanian, Kehutanan, dan perikanan	2,12	1,14	1,61	1,21	-0,37
Pertambangan dan Penggalian	-0,26	4,62	1,04	2,72	4,76
Industri Pengolahan	-1,2	3,68	3,91	5,85	5,37
Pengadaan Listrik dan Gas	4,51	7,56	4,31	5,86	4,33



Lapangan Usaha	Laju Pertumbuhan PDRB (%)				
	2020	2021	2022	2023	2024*
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	2,99	6,57	0,88	2,01	3,39
Konstruksi	-1,96	8,9	16,7	18,27	8,2
Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	-4,79	5,65	4,03	3,68	3,63
Transportasi dan Pergudangan	-28,35	2,13	79,27	4,97	6,07
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	-5,03	8,81	14,94	9,05	8,94
Informasi dan Komunikasi	17,84	5,43	2,36	6,66	7,71
Jasa Keuangan dan Asuransi	3,51	1,99	1,05	0,98	1,17
Real Estate	-0,24	2,19	4,6	6,49	5,04
Jasa Perusahaan	-7,04	3,22	5,07	5,2	8,57
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	-1,26	-1,32	1,04	4,6	7,15
Jasa Pendidikan	-0,18	0,12	1,84	4,78	7,03
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	8,34	0,33	2,14	4,84	7,85
Jasa lainnya	-5,56	0,66	11,24	4,82	6,53
PDRB	-1,17	3,82	5,9	5,7	5,11

*Angka Sementara

Sumber: BPS Kabupaten Klaten, 2025

Kabupaten Klaten memiliki struktur ekonomi yang bervariasi dimana berbagai sektor telah menyumbangkan kontribusinya terhadap PDRB Kabupaten Klaten. Pada tahun 2024, sektor dengan nilai PDRB ADHB tertinggi yaitu sektor Industri Pengolahan yang berkontribusi sebesar 21.301,06 miliar rupiah. Di posisi kedua, sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor yakni sebesar 8.048,51 miliar rupiah. Selanjutnya, sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan menghasilkan PDRB sebesar 5.172,93 miliar rupiah. Secara lengkap dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.31
Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku
Kabupaten Klaten Tahun 2020-2024

Lapangan Usaha	Nilai PDRB (Miliar Rupiah)				
	2020	2021	2022	2023	2024*
Pertanian, Kehutanan, dan perikanan	4.365,91	4.419,24	4.700,66	5.038,47	5.172,93
Pertambangan dan Penggalian	1.253,65	1.326,27	1.380,56	1.458,48	1.535,54
Industri Pengolahan	14.934,78	15.944,98	17.399,29	19.447,07	21.301,06
Pengadaan Listrik dan Gas	61,15	65,39	68,55	72,97	76,25
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	17,01	18,37	18,79	19,40	21,25
Konstruksi	2.515,48	2.850,69	3.550,39	4.328,49	4.714,10
Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	6.145,08	6.575,70	7.113,42	7.617,04	8.048,51
Transportasi dan Pergudangan	576,29	604,75	1.146,86	1.317,90	1.432,23
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.351,40	1.495,96	1.751,76	1.926,08	2.142,33
Informasi dan Komunikasi	1.674,71	1.766,20	1.812,74	1.936,25	2.101,89



Lapangan Usaha	Nilai PDRB (Miliar Rupiah)				
	2020	2021	2022	2023	2024*
Jasa Keuangan dan Asuransi	1.366,58	1.461,02	1.608,10	1.661,74	1.688,84
Real Estate	510,80	528,37	563,55	605,73	639,35
Jasa Perusahaan	135,86	141,79	155,72	170,34	189,13
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, Dan Jaminan Sosial Wajib	910,58	890,53	922,85	984,63	1.078,16
Jasa Pendidikan	2.898,74	2.942,32	3.022,68	3.201,77	3.484,09
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	550,78	557,97	580,28	622,95	680,87
Jasa lainnya	670,82	681,70	795,42	864,90	942,92
PDRB Atas Dasar Harga Berlaku	39.939,64	42.271,26	46.591,61	51.274,19	55.249,45

*Angka Sementara

Sumber: BPS Kabupaten Klaten, 2025

Berdasarkan PDRB Kabupaten Klaten Tahun 2024 menurut Lapangan Usaha atas dasar harga konstan (ADHK) tahun dasar 2010, sektor Industri Pengolahan menjadi penyumbang terbesar dengan nilai mencapai Rp11.396,48 miliar. Di posisi kedua, sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor menyumbang Rp5.535,51 miliar, diikuti sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebesar Rp3.093,04 miliar. Struktur perekonomian Kabupaten Klaten masih sangat bertumpu pada sektor industri pengolahan, diikuti sektor perdagangan dan pertanian. Hal ini menunjukkan bahwa sektor industri dan perdagangan menjadi motor penggerak utama ekonomi daerah. Oleh karena itu, peningkatan produktivitas, daya saing dan keberlanjutan pada sektor-sektor ini perlu menjadi fokus dalam kebijakan pembangunan ekonomi daerah. Selengkapnya dapat dilihat pada dibawah ini.

Tabel 2.32
Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010
Kabupaten Klaten Tahun 2020-2024

Kategori	Nilai PDRB (Miliar Rupiah)				
	2020	2021	2022	2023	2024*
Pertanian, Kehutanan, dan perikanan	2.985,13	3.019,02	3.067,58	3.104,58	3.093,04
Pertambangan dan Penggalian	705,05	737,59	745,25	765,54	802,00
Industri Pengolahan	9.483,87	9.832,84	10.217,66	10.815,41	11.396,48
Pengadaan Listrik dan Gas	51,88	55,81	58,21	61,62	64,29
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	14,74	15,70	15,84	16,16	16,71
Konstruksi	1.708,28	1.860,30	2.170,91	2.567,60	2.778,16
Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4.687,43	4.952,34	5.152,05	5.341,52	5.535,51
Transportasi dan Pergudangan	470,53	480,54	861,44	904,23	959,08
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.043,08	1.134,93	1.304,46	1.422,45	1.549,62
Informasi dan Komunikasi	1.511,72	1.593,77	1.631,35	1.740,06	1.874,16
Jasa Keuangan dan Asuransi	947,45	966,28	976,39	985,99	997,50
Real Estate	419,05	428,22	447,91	476,97	501,00



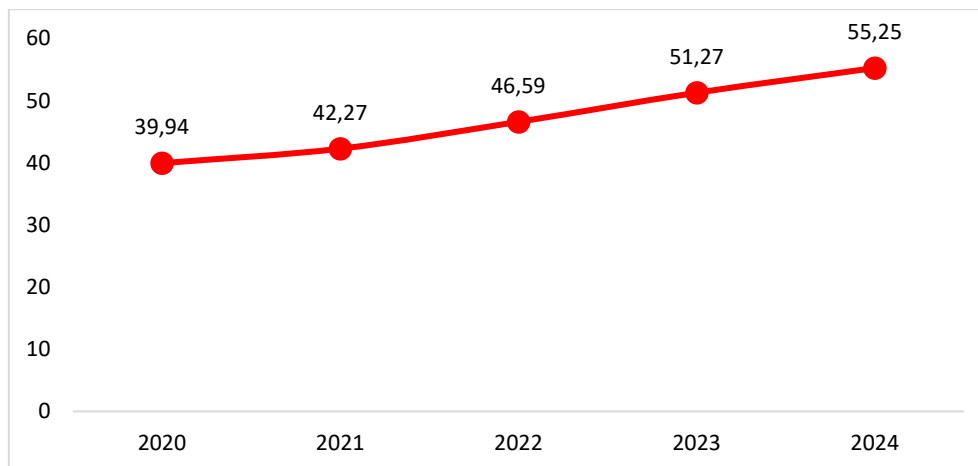
Kategori	Nilai PDRB (Miliar Rupiah)				
	2020	2021	2022	2023	2024*
Jasa Perusahaan	92,40	95,37	100,21	105,42	114,46
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, Dan Jaminan Sosial Wajib	633,38	625,04	631,53	660,60	707,82
Jasa Pendidikan	1.839,36	1.841,65	1.875,51	1.965,18	2.103,29
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	364,38	365,59	373,42	391,50	422,23
Jasa lainnya	522,66	526,12	585,26	613,49	653,57
PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010	27.480,36	28.531,11	30.214,98	31.938,33	33.568,92

*Angka Sementara

Sumber: BPS Kabupaten Klaten, 2025

Salah satu indikator kemakmuran penduduk suatu daerah adalah PDRB per kapita, yaitu nilai tambah seluruh kegiatan ekonomi dibagi jumlah penduduk. Nilai ini dipengaruhi oleh besarnya jumlah penduduk dan potensi ekonomi daerah, seperti sumber daya alam dan faktor produksi lainnya. Selama periode tahun 2020-2024, PDRB per kapita Kabupaten Klaten atas dasar harga berlaku terus meningkat, dengan nilai tertinggi pada tahun 2024 sebesar Rp55,25 juta, mencerminkan pertumbuhan ekonomi yang positif.

Peningkatan PDRB per kapita menunjukkan adanya perbaikan tingkat kemakmuran penduduk di Kabupaten Klaten. Tren ini mencerminkan penguatan produktivitas ekonomi, meskipun tetap perlu diimbangi dengan pemerataan dan peningkatan kualitas hidup agar pertumbuhan ekonomi dapat dirasakan secara luas oleh seluruh masyarakat.



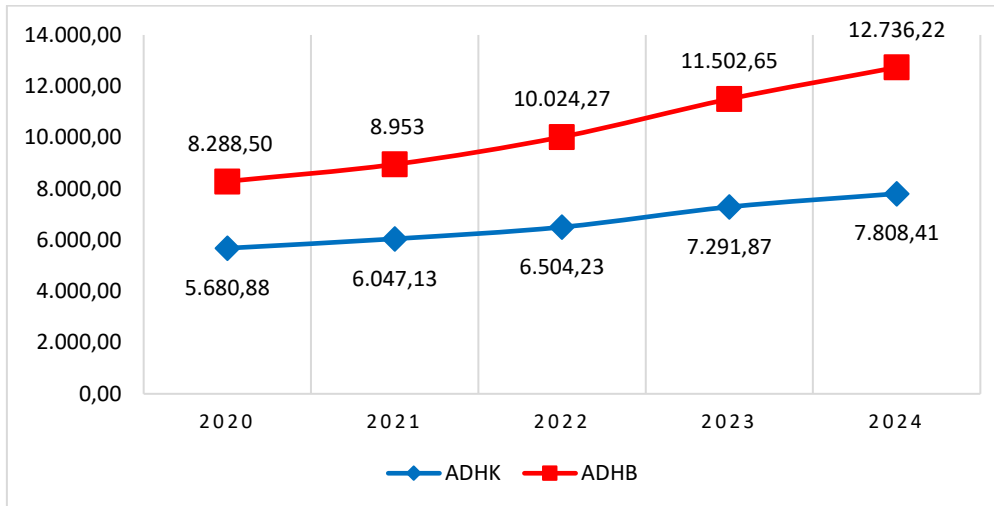
Sumber: BPS Kabupaten Klaten, 2024

Gambar 2.24 PDRB ADHB Perkapita Kabupaten Klaten Tahun 2020-2024

Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) merupakan indikator penting dalam ekonomi yang mengukur investasi dalam aset tetap. Data PMTB digunakan untuk berbagai keperluan analisis ekonomi, termasuk perhitungan PDB dan pemantauan pertumbuhan ekonomi yang mencerminkan tingkat investasi dalam perekonomian dan dapat menjadi indikator pertumbuhan ekonomi di masa depan.



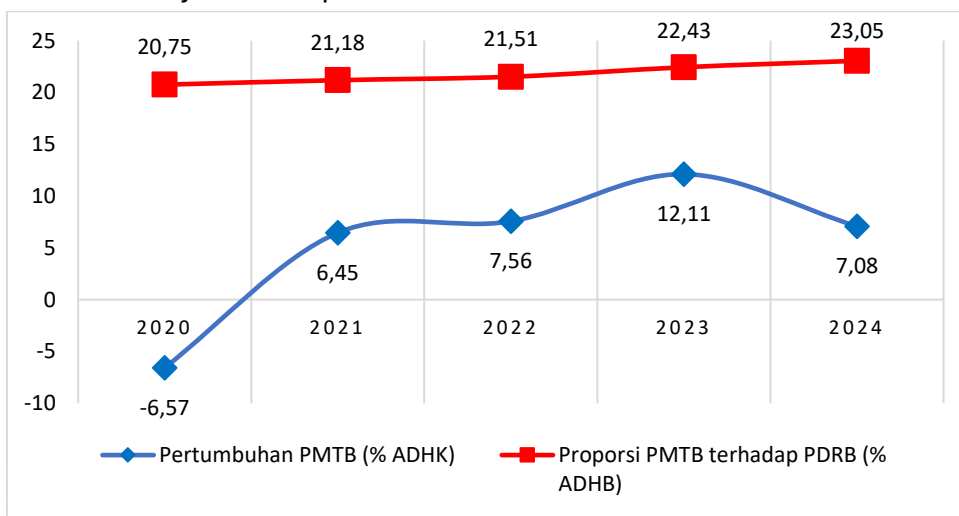
Komponen PMTB terus mengalami kenaikan setelah tahun 2020, baik untuk ADH berlaku maupun ADH konstan 2010. Pada tahun 2020, jumlah total konsumsi PMTB berdasar ADH berlaku sebesar 8.288,50 miliar rupiah naik menjadi 12736,22 miliar rupiah pada tahun 2024. Tidak hanya nilai nominal PMTB yang meningkat, peranannya terhadap perekonomian Kabupaten Klaten selama kurun waktu 3 tahun terakhir terus meningkat, demikian juga pertumbuhan yang meningkat dan mengalami percepatan dari tahun ke tahun.



Sumber: BPS Kabupaten Klaten, 2025

Gambar 2.25 Perkembangan PMTB Kabupaten Klaten (Miliar)

Pada tahun 2023, komponen pengeluaran PMTB mengalami pertumbuhan yang cukup tinggi yaitu sebesar 12,11 persen. Hal ini didorong oleh meningkatnya PMTB Bangunan karena puncak pembangunan jalan tol Surakarta-Yogyakarta yang melalui Kabupaten Klaten, juga meningkatnya pembangunan infrastruktur lainnya di Kabupaten Klaten.

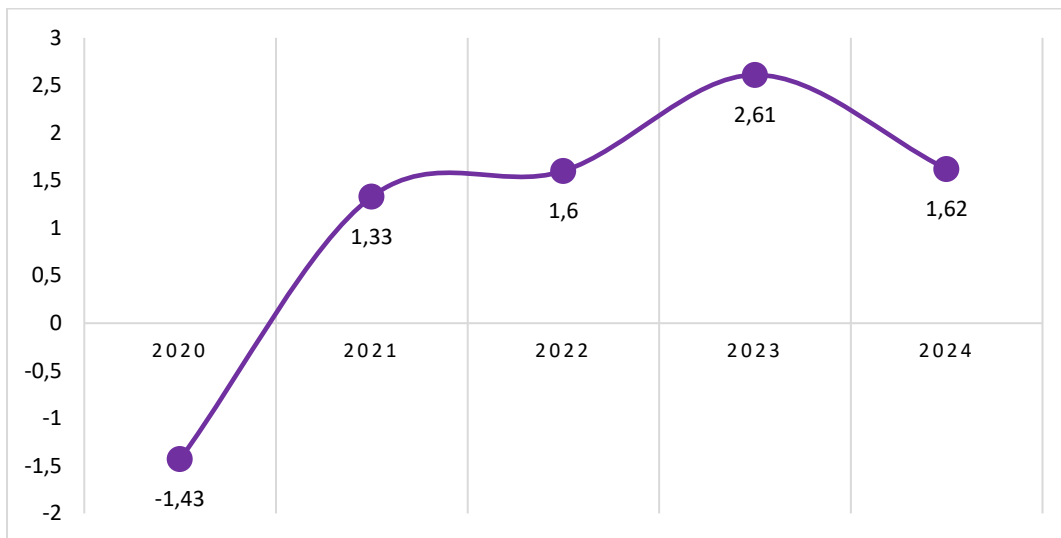


Sumber: BPS Kabupaten Klaten, 2025

Gambar 2.26 Pertumbuhan PMTB ADHB dan ADHK Kabupaten Klaten Tahun 2020-2024



Salah satu sumber pertumbuhan terbesar terhadap laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Klaten adalah Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB). Pada tahun 2024 tercatat sebesar 1,62 persen, sedikit lebih rendah dibandingkan tahun 2023, dengan kontribusi PMTB terhadap pertumbuhan ekonomi sebesar 2,61 persen. Hal tersebut erat kaitannya dengan proyek pembangunan jalan tol Solo-Jogja dan pada tahun 2023 sedang memasuki tahap puncak pembangunan di wilayah Kabupaten Klaten.



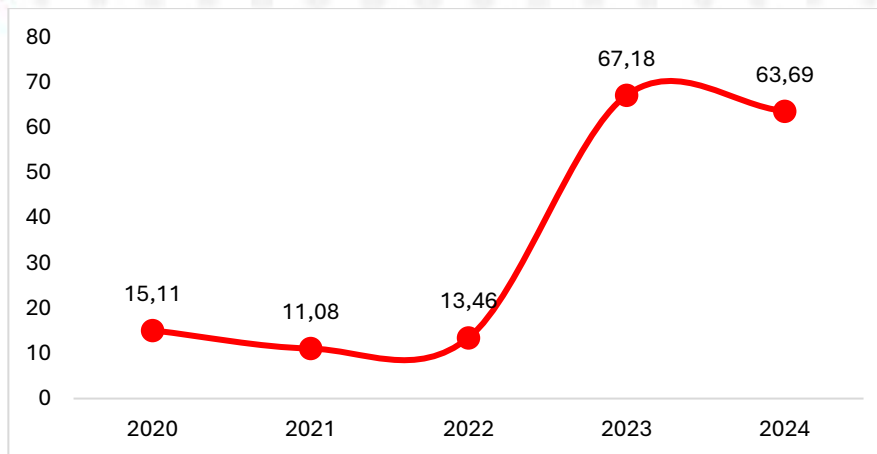
Sumber: BPS Kabupaten Klaten, 2025

Gambar 2.27 Sumber Pertumbuhan PMTB Terhadap Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Klaten Tahun 2020-2024

Transformasi usaha mikro dari sektor informal ke sektor formal merupakan langkah strategis yang terus didorong oleh Pemerintah Kabupaten Klaten sebagai bagian dari upaya penguatan ekonomi rakyat. Formalisasi usaha mikro tidak hanya memberikan legalitas usaha, tetapi juga membuka akses yang lebih luas terhadap pembiayaan, pelatihan, pasar, serta perlindungan hukum. Dengan menjadi usaha formal, pelaku usaha mikro memiliki kesempatan untuk berkembang secara berkelanjutan dan berkontribusi lebih besar terhadap perekonomian daerah.

Dalam kurun waktu tahun 2020 hingga 2024, persentase usaha mikro yang berhasil bertransformasi dari informal ke formal menunjukkan tren peningkatan yang signifikan. Pada tahun 2020, capaian sebesar 15,11% dan terus mengalami kenaikan setiap tahunnya, hingga capaian paling tinggi pada tahun 2023 sebesar 67,18%. Meskipun pada tahun 2024 capaian tersebut mengalami sedikit penurunan menjadi 63,69%, secara keseluruhan capaian lima tahunan tetap menunjukkan peningkatan.

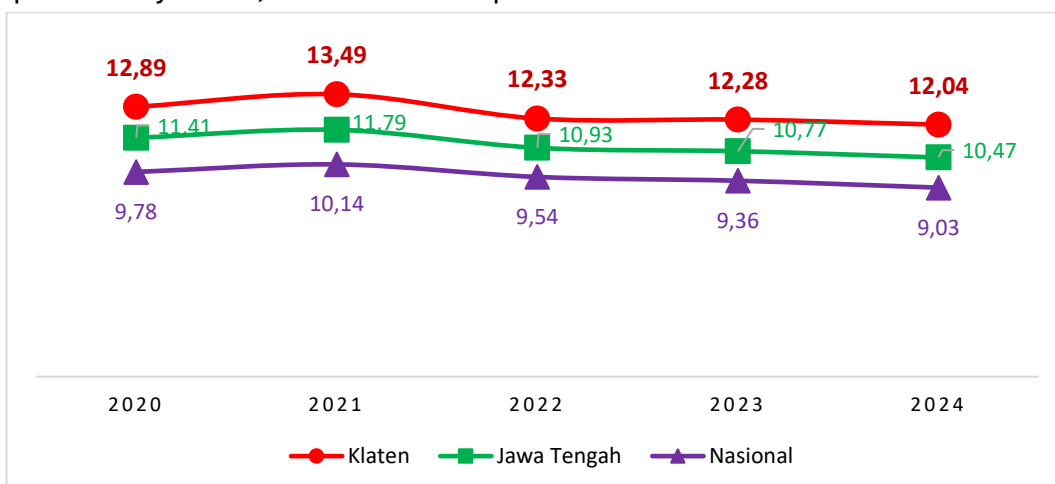




Gambar 2.28 Persentase Usaha Mikro yang bertransformasi dari Informal menjadi Formal di Kabupaten Klaten Tahun 2020-2024

Pertumbuhan ekonomi memainkan peran penting dalam pengentasan kemiskinan, namun tidak cukup jika tidak disertai dengan pemerataan pembangunan. Pertumbuhan ekonomi yang tidak inklusif dapat menyebabkan ketimpangan, di mana masyarakat rentan tidak merasakan manfaatnya. Pada tahun 2024, persentase penduduk miskin di Kabupaten Klaten tercatat sebesar 12,04%, menurun 0,24% dibandingkan tahun 2023. Meski merupakan capaian positif, angka tersebut masih lebih tinggi dibandingkan rata-rata Provinsi Jawa Tengah dan nasional, menunjukkan tantangan dalam mempercepat penurunan kemiskinan secara menyeluruh.

Penurunan angka kemiskinan di Kabupaten Klaten merupakan langkah progresif, namun tantangan masih ada mengingat persentasenya relatif tinggi dibandingkan provinsi dan nasional. Diperlukan strategi pembangunan yang lebih inklusif agar pertumbuhan ekonomi dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, terutama kelompok rentan dan miskin.

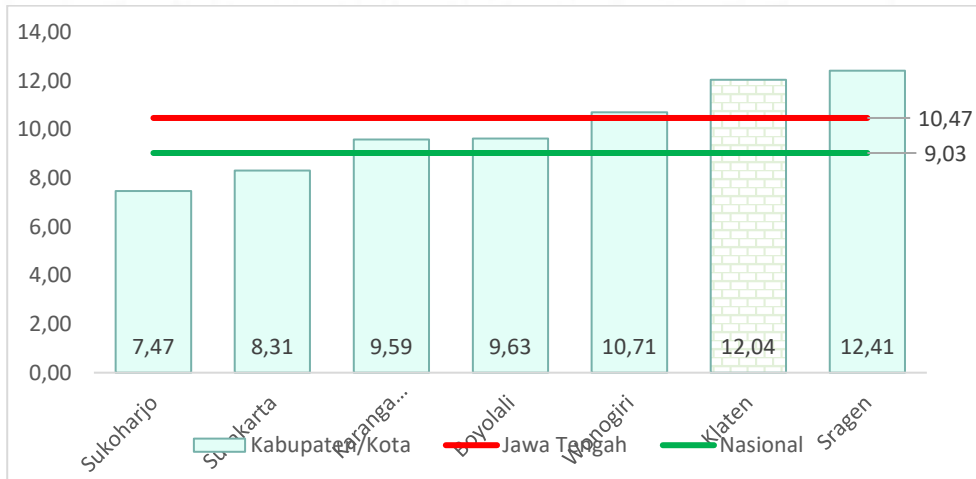


Sumber: BPS Jawa Tengah, 2025

Gambar 2.29 Perkembangan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2020-2024



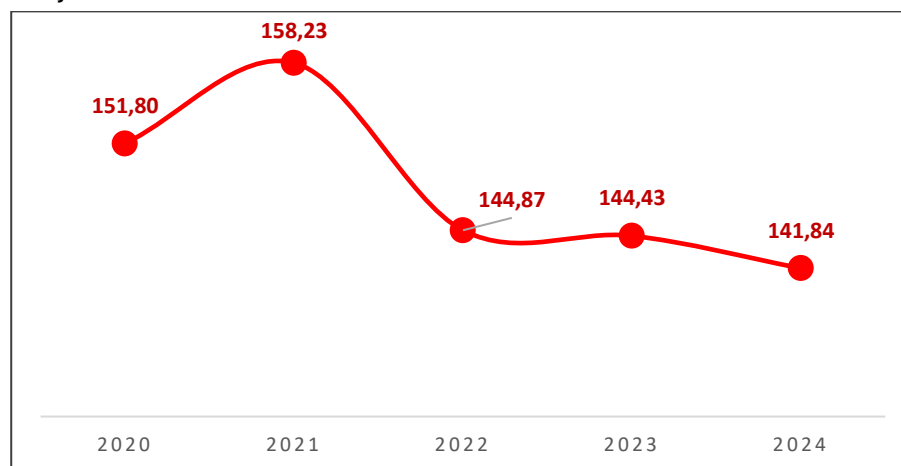
Persentase penduduk miskin Kabupaten Klaten jika dibandingkan dengan Kabupaten/Kota sekitarnya menduduki peringkat ke dua teratas, posisi pertama adalah Kabupaten Sragen sebesar 12,41%. Persentase penduduk miskin di Kabupaten Klaten lebih tinggi dibandingkan rata-rata persentase penduduk miskin Provinsi Jawa Tengah dan Nasional.



Sumber: BPS Jawa Tengah, 2025

Gambar 2.30 Posisi relatif Persentase jumlah penduduk miskin Kabupaten Klaten dengan Kabupaten/Kota Sekitar Tahun 2024

Selama lima tahun terakhir, jumlah penduduk miskin tertinggi di Kabupaten Klaten terjadi pada tahun 2021 dengan jumlah 158,23 ribu jiwa. Seiring dengan kondisi perekonomian Kabupaten Klaten yang berangsur membaik, jumlah penduduk miskin semakin berkurang di tahun 2024 menjadi 141,84 ribu jiwa.

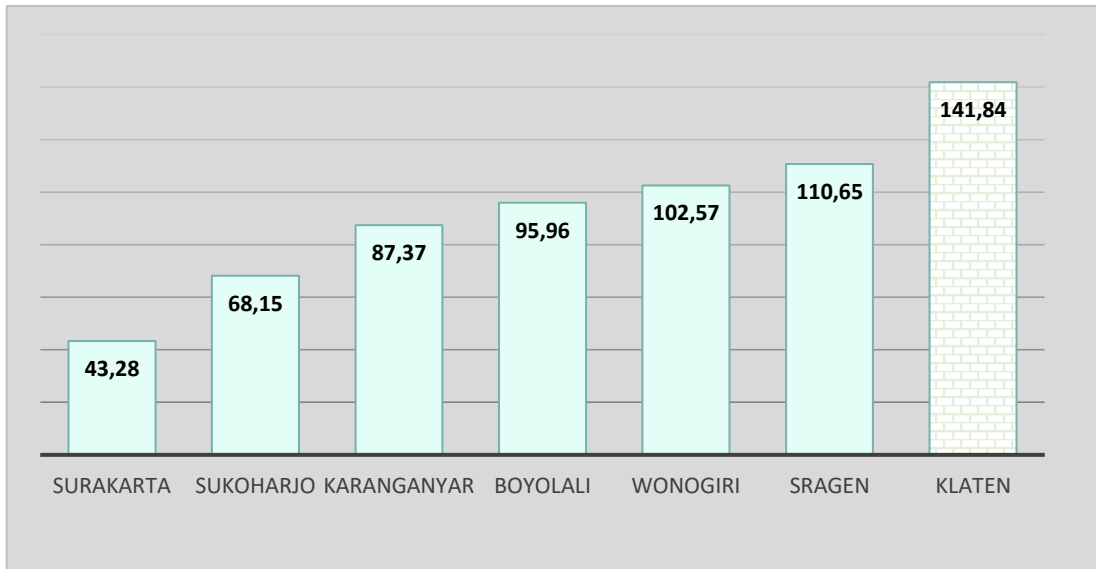


Sumber: BPS Jawa Tengah, 2025

Gambar 2.31 Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Klaten Tahun 2020-2024



Jika dibandingkan dengan jumlah penduduk miskin di wilayah Subosukawonosraten tahun 2024, penduduk miskin Kabupaten Klaten menempati peringkat teratas. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut.



Sumber: BPS Jawa Tengah, 2025

Gambar 2.32 Posisi Relatif Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Klaten dengan Kabupaten/Kota Sekitar Tahun 2024

Dengan memperhatikan komponen Garis Kemiskinan (GK), yang terdiri dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Bukan Makanan (GKBM), peranan komoditi makanan masih jauh lebih besar dibandingkan peranan komoditi bukan makanan. Berdasarkan daftar komoditi makanan yang memberi pengaruh besar terhadap kenaikan garis kemiskinan di Jawa Tengah pada Maret 2024, baik di perkotaan maupun di perdesaan pada umumnya hampir sama, kecuali komoditas roti dan kue basah yang memberikan sumbangan besar di perkotaan namun tidak di perdesaan. Sementara komoditas cabe rawit dan kopi memberikan sumbangan besar di perdesaan namun tidak di perkotaan. Beras masih memberikan sumbangan terbesar yakni sebesar 22,73 persen di perkotaan dan 24,31 persen di perdesaan. Rokok kretek filter memberikan sumbangan terbesar kedua terhadap Garis Kemiskinan (10,10 persen di perkotaan dan 9,03 persen di perdesaan). Komoditi lainnya adalah daging ayam ras (4,54 persen di perkotaan dan 3,80 persen di perdesaan), telur ayam ras (4,34 persen di perkotaan dan 3,92 persen di perdesaan), tempe (2,49 persen di perkotaan dan 2,56 persen di perdesaan) dan seterusnya.



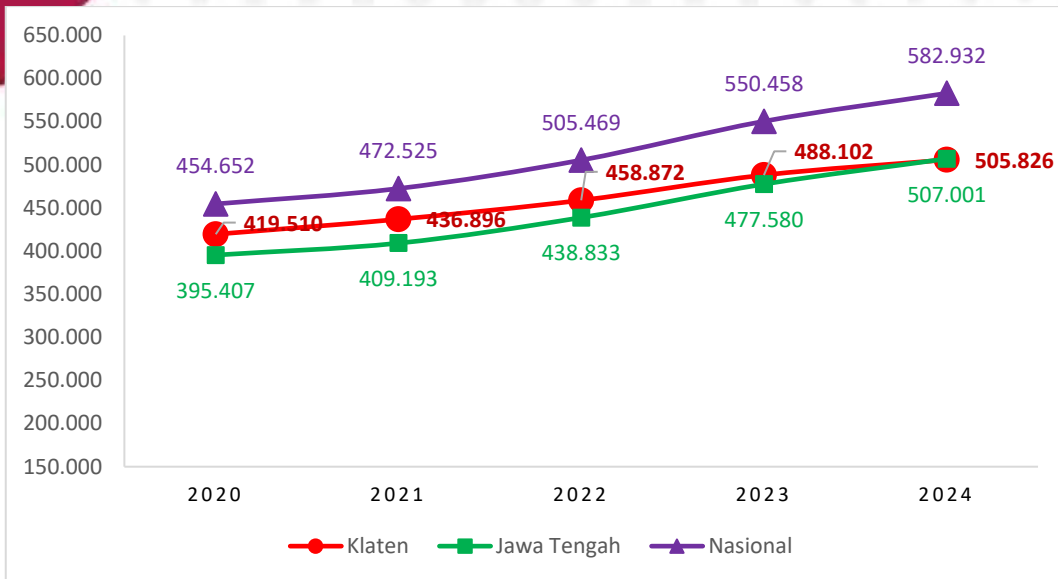
Tabel 2.33

Daftar Komoditi yang Memberi Sumbangan Besar Terhadap Garis Kemiskinan beserta Kontribusinya Tingkat Provinsi Jawa Tengah periode Maret 2024

No	Komoditi	Kota (%)	Komoditi	Desa (%)
	Makanan	75,54	Makanan	75,70
1.	Beras	22,73	Beras	24,31
2.	Rokok kretek filter	10,10	Rokok kretek filter	9,03
3.	Daging ayam ras	4,54	Telur ayam ras	3,92
4.	Telur ayam ras	4,34	Daging ayam ras	3,80
5.	Tempe	2,49	Tempe	2,56
6.	Gula pasir	2,35	Mie instan	2,30
7.	Mie instan	2,33	Gula pasir	2,29
8.	Roti	2,33	Tahu	2,22
9.	Kue basah	2,08	Cabe rawit	2,17
10.	Tahu	2,06	Kopi bubuk & kopi instan (sachet)	2,11
11.	Komoditi makanan lainnya	20,43	Komoditi makanan lainnya	20,99
	Bukan Makanan	24,46	Bukan Makanan	24,30
1.	Perumahan	7,03	Perumahan	8,04
2.	Bensin	4,43	Bensin	4,17
3.	Listrik	2,62	Listrik	1,73
4.	Pendidikan	1,85	Pendidikan	1,23
5.	Perlengkapan mandi	1,19	Perlengkapan mandi	1,14
6.	Kesehatan	0,82	Kesehatan	0,97
7.	Pajak kendaraan bermotor	0,61	Sabun cuci	0,76
8.	Pengeluaran bukan makanan lainnya	5,91	Pengeluaran bukan makanan lainnya	6,26

Sumber: BPS Jawa Tengah, 2025

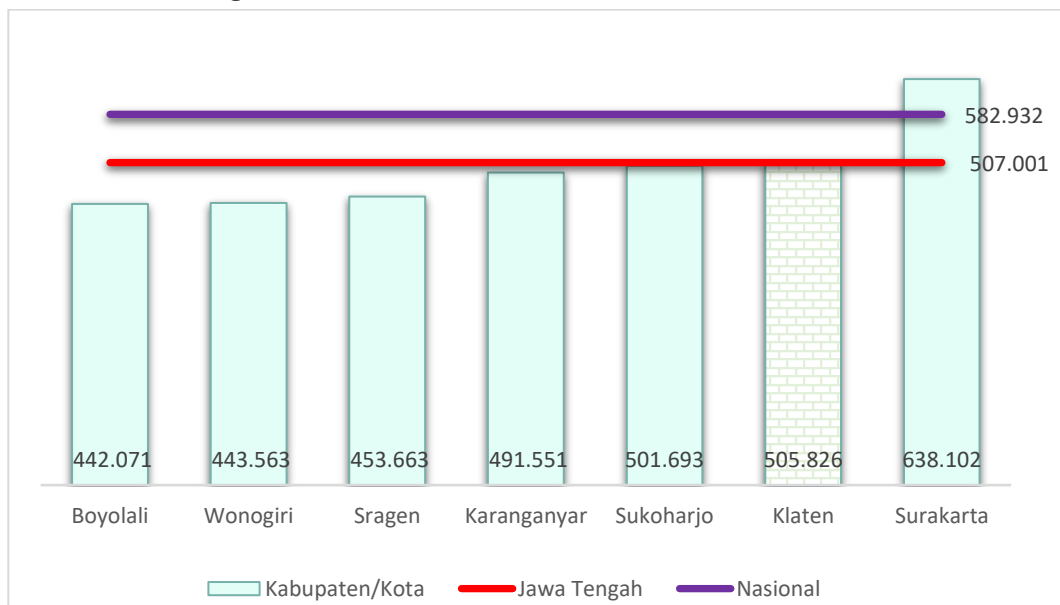
Garis Kemiskinan di Kabupaten Klaten menunjukkan tren peningkatan dari tahun ke tahun, yang mencerminkan meningkatnya biaya hidup minimum untuk memenuhi kebutuhan dasar, baik makanan maupun non-makanan. Pada tahun 2024, GK mencapai Rp505.826 per kapita per bulan, naik 3,63% dari tahun sebelumnya. Kenaikan ini tidak hanya dipengaruhi oleh inflasi, tetapi juga oleh perubahan pola konsumsi masyarakat. Pemaknaan praktis dari GK ini menunjukkan bahwa rumah tangga dengan 4 anggota perlu memiliki pengeluaran minimal Rp2.023.304 per bulan agar tidak tergolong miskin. Fakta ini menjadi acuan penting bagi pemerintah daerah dalam merancang program perlindungan sosial, pengentasan kemiskinan, serta penyusunan upah minimum yang relevan dengan kebutuhan dasar penduduk.



Sumber: BPS Jawa Tengah, 2025

Gambar 2.33 Perkembangan Garis kemiskinan Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2020-2024

Garis Kemiskinan Kabupaten Klaten jika dibandingkan dengan Kabupaten sekitarnya berada di peringkat tinggi ke dua, pada peringkat pertama Kota Surakarta sebesar Rp. 638.102,-/ kapita/ bulan. Namun demikian garis kemiskinan Kabupaten Klaten berada di bawah rata-rata garis kemiskinan Provinsi Jawa tengah dan Nasional.

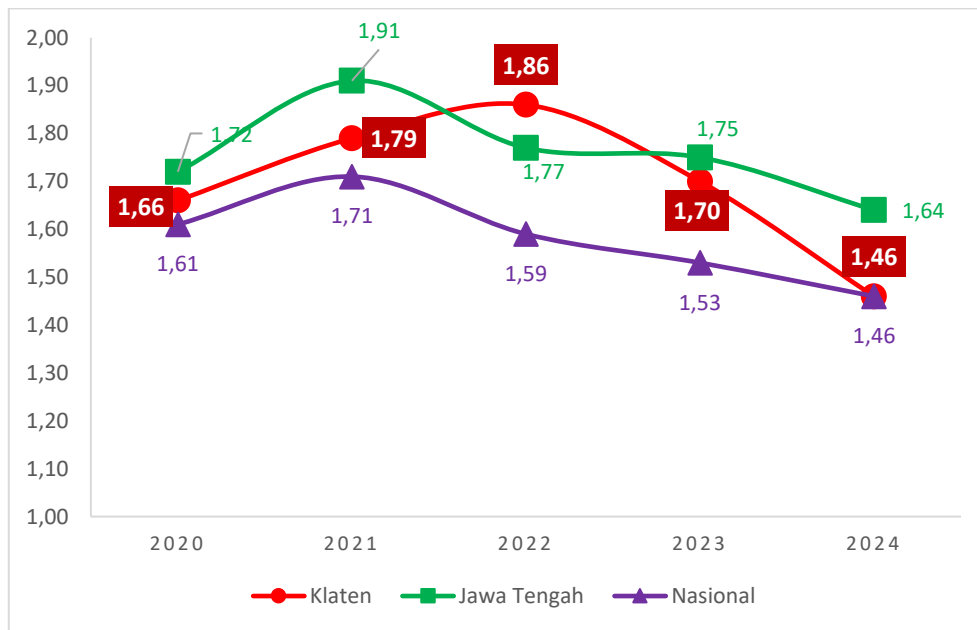


Sumber: BPS Jawa Tengah, 2025

Gambar 2.34 Posisi Relatif Garis Kemiskinan Kabupaten Klaten dengan Kabupaten/ Kota Sekitar Tahun 2024



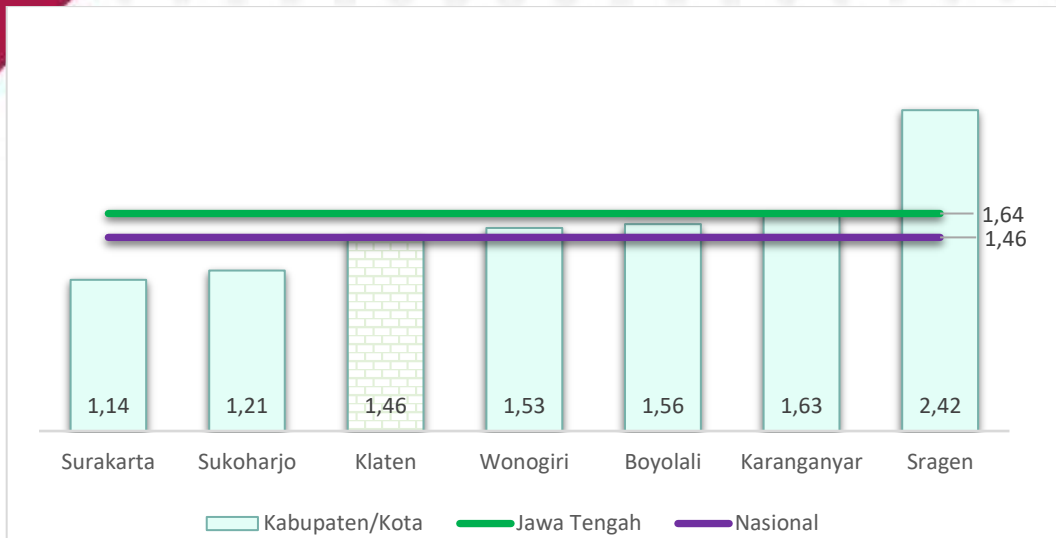
Untuk mengukur kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan, dilihat dari Indeks Kedalaman Kemiskinannya. Semakin tinggi nilai indeks, menunjukkan semakin besar kesenjangan pendapatan penduduk miskin dengan garis kemiskinan. Selama periode tahun 2020 hingga tahun 2024, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) menunjukkan fluktuasi dengan tren menurun. Indeks Kedalaman Kemiskinan tahun 2023 tercatat sebesar 1,70 dan menurun pada tahun 2024 menjadi 1,46, dengan demikian terjadi penurunan sebesar 0,24 poin. Hal tersebut menunjukkan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin Kabupaten Klaten pada tahun 2024 semakin mendekati Garis Kemiskinan dibandingkan tahun sebelumnya.



Sumber: BPS Jawa Tengah, 2025

Gambar 2.35 Perkembangan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2020-2024

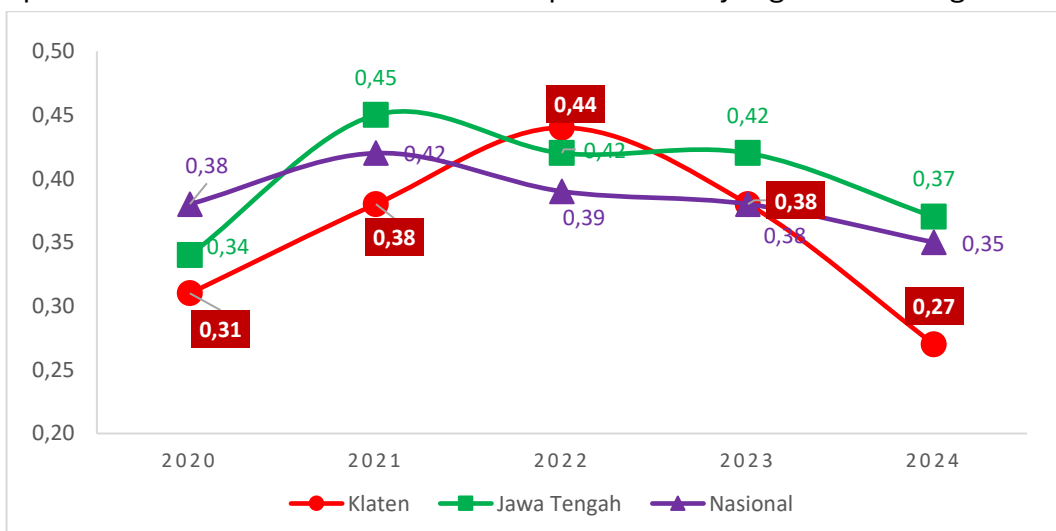
Berdasarkan posisi relatif Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten Klaten pada tahun 2024, jika dibandingkan dengan Kabupaten/Kota di sekitarnya, Kabupaten Klaten berada di peringkat kelima. Peringkat pertama di tempati oleh Kabupaten Sragen sebesar 2,42, diikuti oleh Kabupaten Karanganyar sebesar 1,62, Kabupaten Boyolali sebesar 1,54 dan Kabupaten Wonogiri di peringkat keempat sebesar 1,53. Selain itu, Kabupaten Klaten juga berada di bawah rata-rata P1 Provinsi Jawa Tengah dan Nasional.



Sumber: BPS Jawa Tengah, 2025

Gambar 2.36 Posisi Relatif Perbandingan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Dengan Kabupaten/ Kota Sekitar Tahun 2024

Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin. Perkembangan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten Klaten mengalami penurunan dari 0,38 pada tahun 2023 menjadi 0,27 pada tahun 2024. Penurunan P2 di Kabupaten Klaten mencerminkan kesenjangan penduduk miskin semakin berkurang. Penurunan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) ini memberikan keuntungan bagi pemerintah daerah, karena upaya pengentasan kemiskinan dapat lebih fokus dan tidak memerlukan pendekatan yang terlalu beragam.

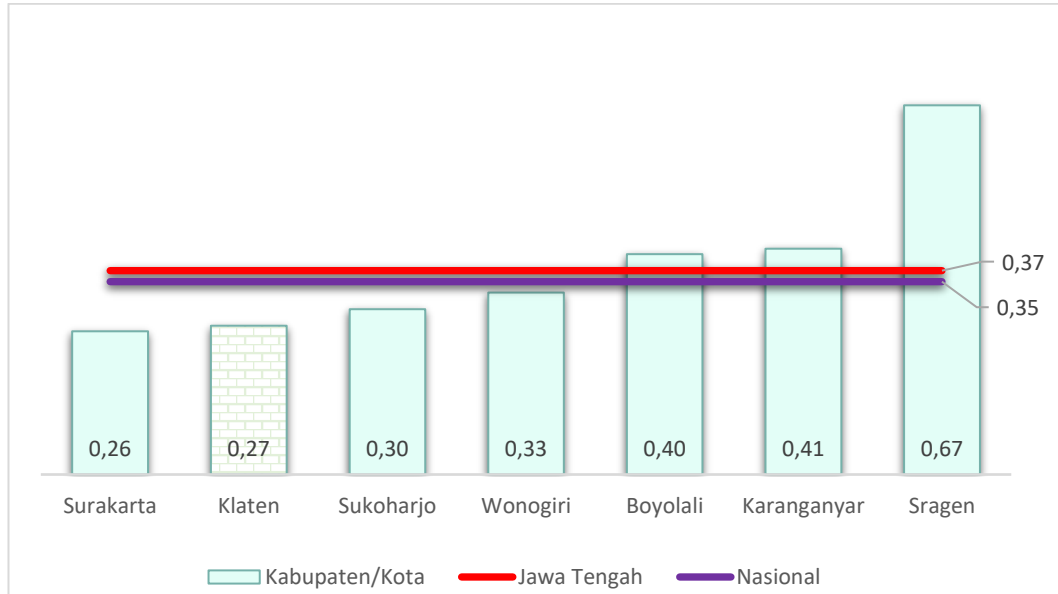


Sumber: BPS Jawa Tengah, 2025

Gambar 2.37 Perkembangan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2020-2024



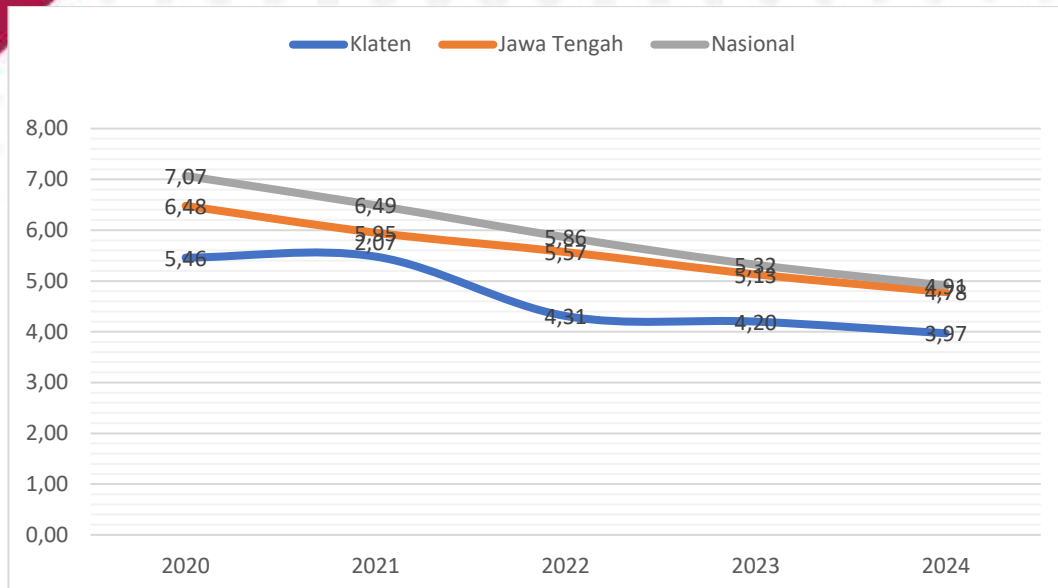
Berdasarkan posisi relatif Indeks Kedalaman Kemiskinan (P2) Kabupaten Klaten pada tahun 2024, jika dibandingkan dengan Kabupaten/Kota di sekitarnya, Kabupaten Klaten berada peringkat rendah kedua, peringkat terendah ditempati oleh Kota Surakarta sebesar 0,26. Selain itu Kabupaten Klaten juga berada di bawah rata-rata P2 Provinsi Jawa Tengah dan Nasional.



Sumber: BPS Jawa Tengah, 2024

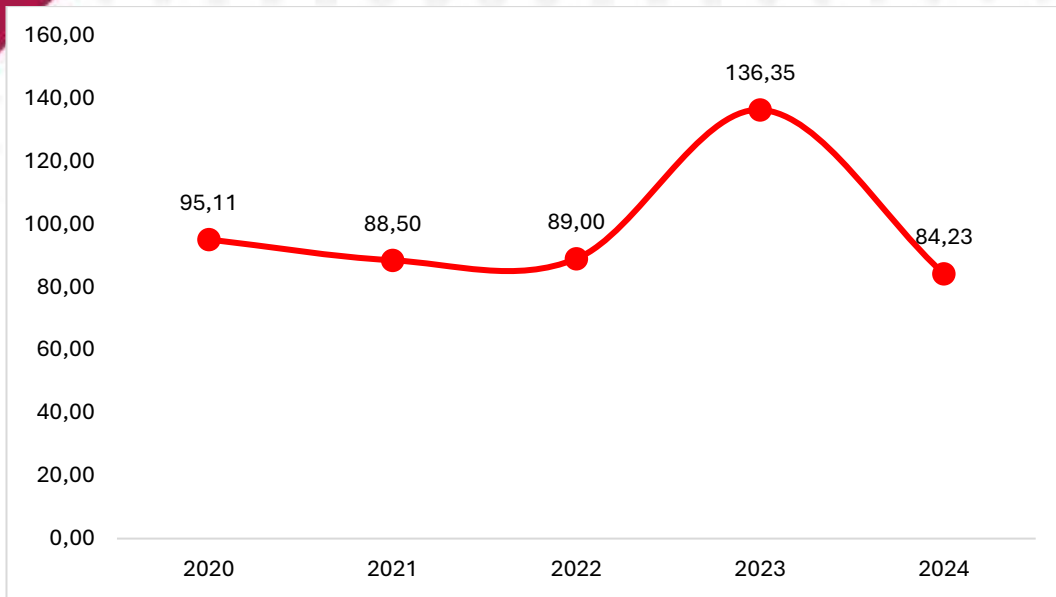
Gambar 2.38 Posisi Relatif Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) dengan Kabupaten/Kota sekitar Tahun 2024

Tingkat kemiskinan ekstrem di Kabupaten Klaten menunjukkan tren penurunan dari 5,46 persen pada tahun 2020 menjadi 3,97 persen pada tahun 2024 dan secara konsisten berada di bawah rata-rata Provinsi Jawa Tengah maupun nasional. Penurunan yang signifikan terjadi pada periode 2021–2022, meskipun laju penurunannya cenderung melambat pada tahun-tahun berikutnya. Capaian ini mencerminkan efektivitas kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan yang telah dilaksanakan, namun diperlukan langkah berkelanjutan dan terukur agar target penghapusan kemiskinan ekstrem dapat tercapai sesuai sasaran.



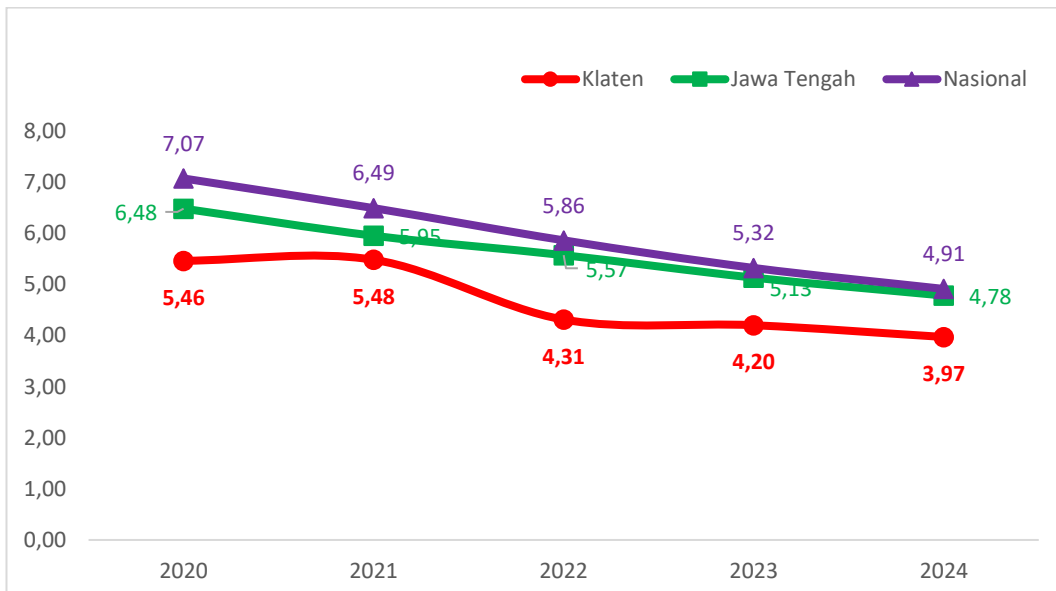
Gambar 2.39 Capaian Tingkat Kemiskinan Ekstrem Kabupaten Klaten Tahun 2020-2024

Dalam kurun waktu lima tahun terakhir (2020–2024), capaian persentase penerima manfaat yang kebutuhan dasarnya terpenuhi menunjukkan pola yang fluktuatif. Pada tahun 2020, capaian berada pada angka 95,11%, menunjukkan bahwa sebagian besar penerima manfaat telah mendapat akses terhadap pemenuhan kebutuhan dasar. Kemudian terjadi peningkatan signifikan hingga mencapai 136,35% pada tahun 2023 kemudian pada tahun 2024 capaian menurun menjadi 84,23%. Penurunan ini menunjukkan adanya tantangan dalam pelaksanaan program, baik dari sisi pendanaan, distribusi bantuan, akurasi data sasaran, maupun dampak eksternal seperti kondisi sosial ekonomi dan bencana yang mungkin memengaruhi ketersediaan dan akses masyarakat terhadap layanan dasar. Penurunan angka tersebut menjadi dasar bagi pemerintah daerah dan pemangku kepentingan untuk melakukan perbaikan sistem pendataan, penguatan koordinasi lintas sektor, serta penyesuaian kebijakan agar penyaluran bantuan dapat lebih tepat sasaran dan berkelanjutan. Diharapkan strategi pemenuhan kebutuhan dasar dapat dilakukan secara lebih terintegrasi dan adaptif terhadap perubahan kondisi masyarakat, sehingga seluruh penerima manfaat dapat menikmati hak dasar mereka secara layak dan bermartabat.



Gambar 2.40 Persentase Penerima Manfaat yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar di Kabupaten Klaten Tahun 2020-2024

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Secara sederhana, TPT mengukur seberapa besar angkatan kerja yang tidak memiliki pekerjaan dan sedang mencari pekerjaan. Apabila dibandingkan dengan kabupaten/kota sekitar, maka TPT Kabupaten Klaten tahun 2024 berada pada posisi kedua tertinggi setelah urutan pertama di tempati Kota Surakarta sebesar 4,61%.

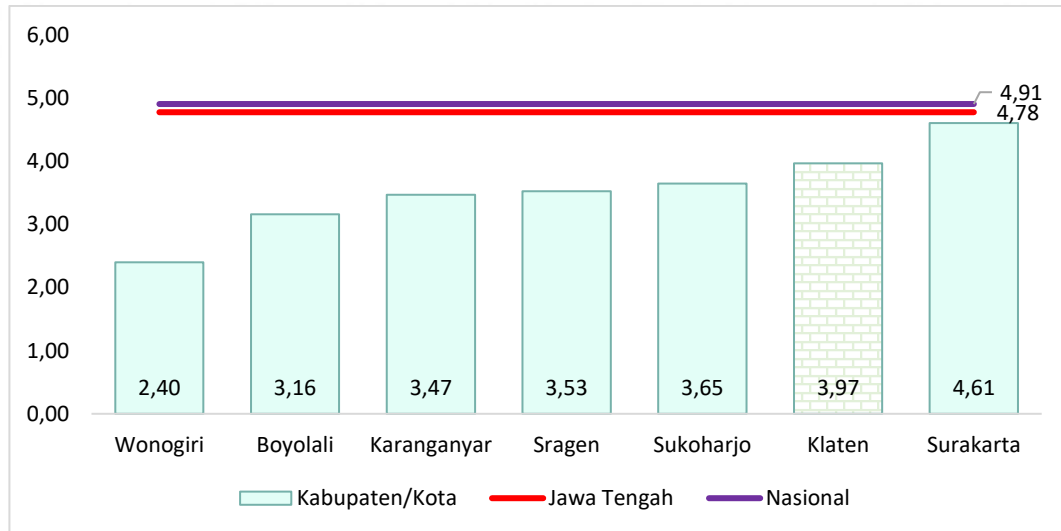


Sumber: BPS Jawa Tengah, 2025

Gambar 2.41 Perkembangan TPT Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2020-2024



Jika disandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional, capaian TPT Kabupaten Klaten masih lebih baik, berada dibawah rata-rata TPT provinsi Jawa Tengah dan Nasional.



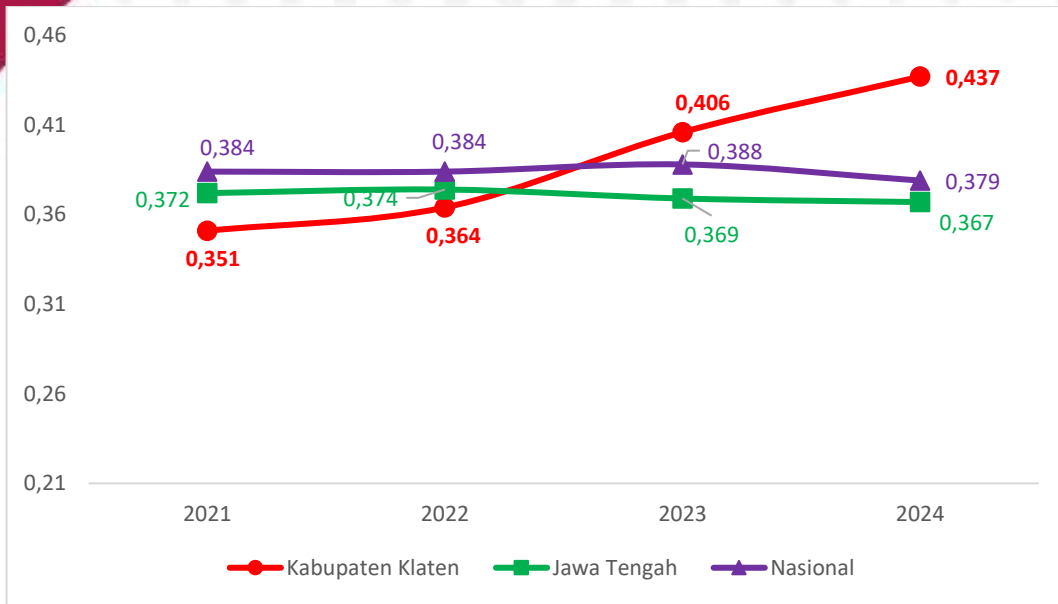
Sumber: BPS Jawa Tengah, 2024

Gambar 2.42 Posisi Relatif Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Klaten dengan Kabupaten/ Kota Sekitar Tahun 2024

Aspek kesenjangan ekonomi dapat diukur melalui **Indeks Gini (Gini Ratio)**, yang merupakan indikator untuk menilai tingkat ketimpangan distribusi pendapatan di suatu wilayah. Nilai Gini Ratio berada pada rentang antara 0 hingga 1. Semakin mendekati angka 0, distribusi pendapatan menunjukkan pemerataan yang sempurna; sebaliknya, semakin mendekati angka 1, distribusi pendapatan menunjukkan ketimpangan yang sangat tinggi.

Di Kabupaten Klaten, nilai Gini Ratio menunjukkan kecenderungan meningkat selama periode 2021–2024. Pada tahun 2021, Gini Ratio tercatat sebesar 0,351 dan meningkat menjadi 0,437 pada tahun 2024. Meskipun masih berada dalam kategori ketimpangan sedang, tren peningkatan ini mencerminkan melebar-nya kesenjangan pendapatan antar golongan masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Klaten masih menghadapi tantangan serius dalam mewujudkan pemerataan ekonomi.

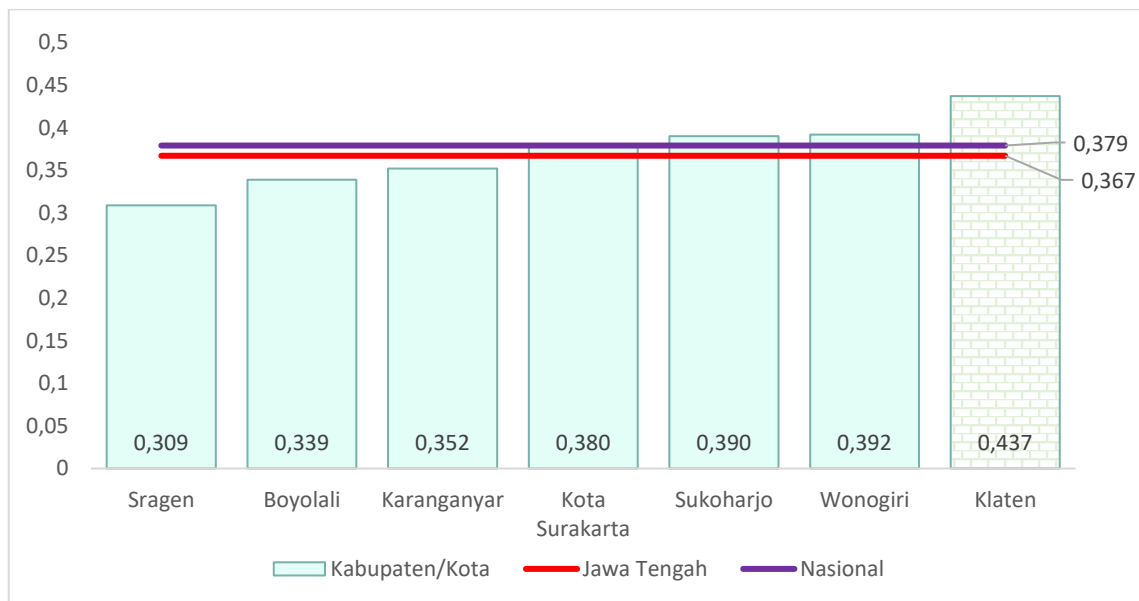
Peningkatan Gini Ratio di Klaten ini juga **berbeda arah** dengan tren di tingkat Provinsi Jawa Tengah dan nasional, yang justru menunjukkan **penurunan ketimpangan** dalam kurun waktu yang sama. Kondisi ini menandakan perlunya intervensi yang lebih terarah dan berkeadilan untuk menurunkan ketimpangan dan mendorong inklusivitas pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Klaten.



Sumber: BPS Jawa Tengah, 2025

Gambar 2.43 Perkembangan Gini Rasio Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2021-2024

Jika dibandingkan dengan Kabupaten/Kota di sekitarnya, Gini Ratio Kabupaten Klaten masih termasuk yang tertinggi dan melebihi Gini Ratio di Provinsi Jawa Tengah serta Nasional. Oleh karena itu diperlukan program-program pembangunan yang dapat mengurangi ketimpangan ekonomi di daerah.



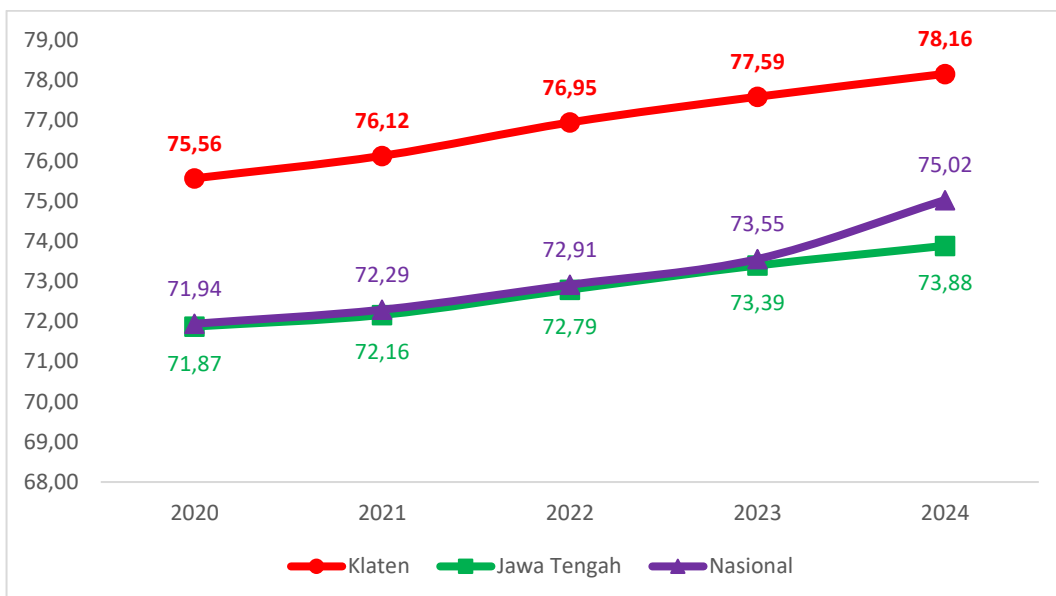
Gambar 2.44 Posisi Relatif Gini Rasio Kabupaten Klaten dengan Kabupaten/ Kota Sekitar Tahun 2024



Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Klaten menunjukkan tren positif dan stabil dalam lima tahun terakhir, meningkat dari 75,56 pada tahun 2020 menjadi 78,16 pada tahun 2024 dan dikategorikan sebagai “Tinggi”. Capaian ini bahkan melampaui rata-rata IPM Provinsi Jawa Tengah dan Nasional, menandakan kemajuan signifikan dalam aspek pendidikan, kesehatan dan standar hidup masyarakat.

Namun demikian, tingginya IPM belum sejalan dengan penurunan angka kemiskinan yang signifikan, menunjukkan adanya kesenjangan pemerataan pembangunan, terutama dalam bidang pendidikan. Permasalahan seperti Anak Tidak Sekolah (ATS), ketimpangan kualitas tenaga pendidik, keterbatasan sarana-prasarana, serta kurangnya pemanfaatan teknologi informasi menjadi hambatan dalam mewujudkan pendidikan yang merata dan berkualitas.

Untuk mencapai pembangunan manusia yang inklusif dan berkeadilan, perlu adanya intervensi strategis dalam pemerataan pendidikan, peningkatan kualitas pengajaran, serta penguatan akses terhadap layanan dasar di seluruh wilayah Kabupaten Klaten. Dengan begitu, IPM yang tinggi akan lebih berdampak terhadap peningkatan kesejahteraan dan penurunan kemiskinan secara nyata.



Sumber: BPS Jawa Tengah, 2025

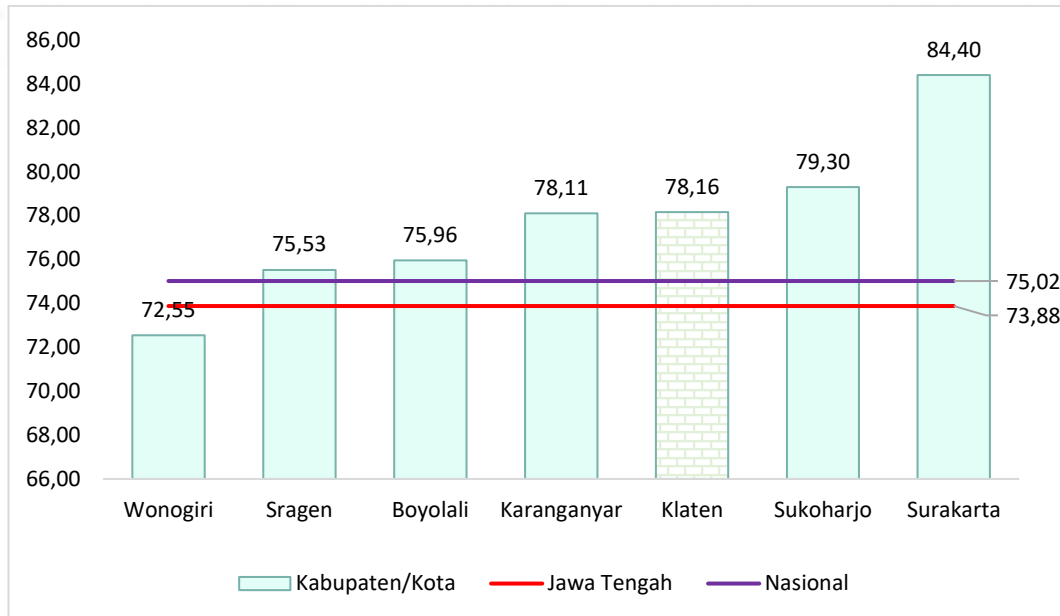
Gambar 2.45 Perkembangan IPM Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2020-2024

Apabila dibandingkan dengan Kabupaten/Kota sekitarnya, capaian IPM Kabupaten Klaten pada tahun 2024 menempati posisi ketiga tertinggi. Posisi pertama ditempati oleh Kota Surakarta sebesar 84,40 disusul Kabupaten





Sukoharjo sebesar 79,30. Capaian IPM Kabupaten Klaten menunjukkan perkembangan yang lebih baik, berada di atas rata-rata capaian IPM Provinsi Jawa Tengah maupun Nasional.



Sumber: BPS Jawa Tengah, 2025

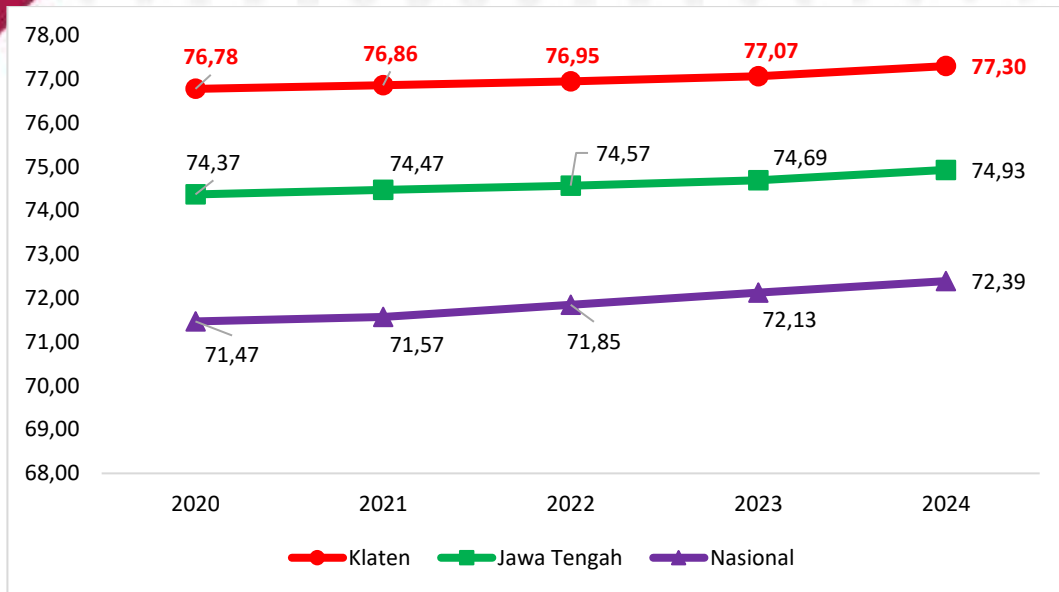
Gambar 2.46 Posisi Relatif Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Klaten dengan Kabupaten/Kota Sekitar Tahun 2024

Terdapat beberapa komponen dalam pengukuran IPM. Pengukuran IPM meliputi 3 dimensi, diantaranya adalah Dimensi Umur Panjang dan Sehat, Dimensi Pendidikan dan Dimensi Standar Hidup Layak. Berikut adalah uraian yang menjelaskan mengenai dimensi yang terdapat dalam pengukuran IPM.

1. Dimensi Umur Panjang dan Hidup Sehat

Umur Harapan Hidup (UHH) merupakan indikator penting untuk mengukur kesejahteraan dan derajat kesehatan penduduk, sekaligus menjadi alat evaluasi kinerja pemerintah daerah dalam bidang kesehatan. Di Kabupaten Klaten, UHH menunjukkan tren positif selama periode 2020–2024, meningkat dari 76,79 tahun pada 2020 menjadi 77,30 tahun pada 2024. Angka ini mencerminkan bahwa rata-rata penduduk Klaten diperkirakan dapat hidup hingga usia 77 tahun dan capaian tersebut berada di atas rata-rata Provinsi Jawa Tengah maupun nasional.

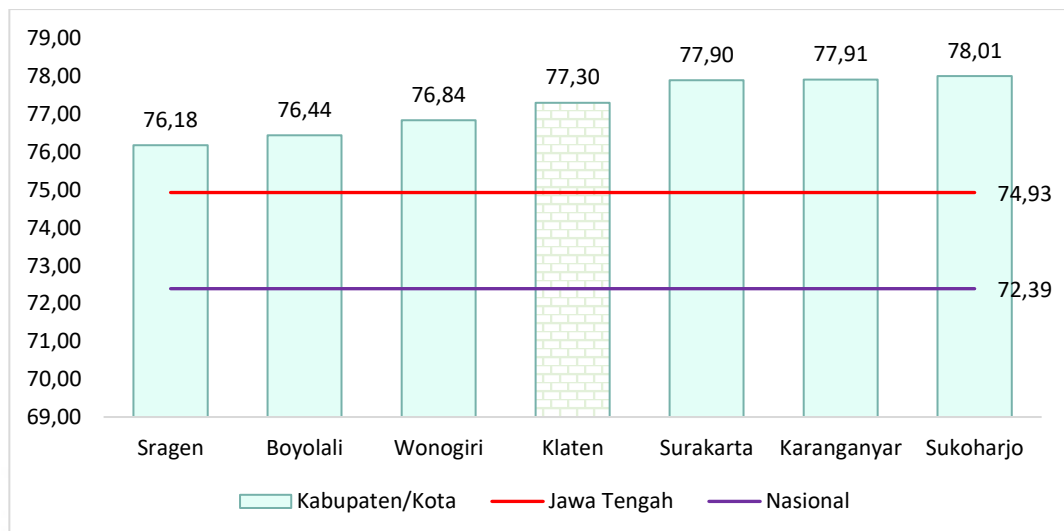
Peningkatan ini mengindikasikan membaiknya layanan kesehatan dan kualitas hidup masyarakat Klaten secara umum. Namun demikian, tantangan tetap ada, terutama terkait kasus kematian ibu, bayi dan balita yang masih terjadi. Upaya perbaikan gizi, akses layanan kesehatan dasar dan penurunan angka kematian ibu dan anak tetap menjadi prioritas untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian ini di masa mendatang.



Sumber: BPS Jawa Tengah, 2025

Gambar 2.47 Perkembangan Umur Harapan Hidup (UHH) Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2020-2024

Jika dibandingkan dengan Kabupaten/Kota sekitarnya, capaian UHH Kabupaten Klaten pada tahun 2024 menduduki urutan keempat setelah posisi tertinggi ditempati oleh Kabupaten Sukoharjo sebesar 78,01 tahun, diikuti Kabupaten Karanganyar 77,91 tahun dan Kota Surakarta 77,90 tahun. Meskipun demikian, capaian UHH Kabupaten Klaten berada di atas rata-rata Provinsi Jawa Tengah dan Nasional. Hal ini mencerminkan semakin membaiknya pelayanan kesehatan untuk masyarakat dan didukung meningkatnya kesadaran masyarakat akan kesehatan.



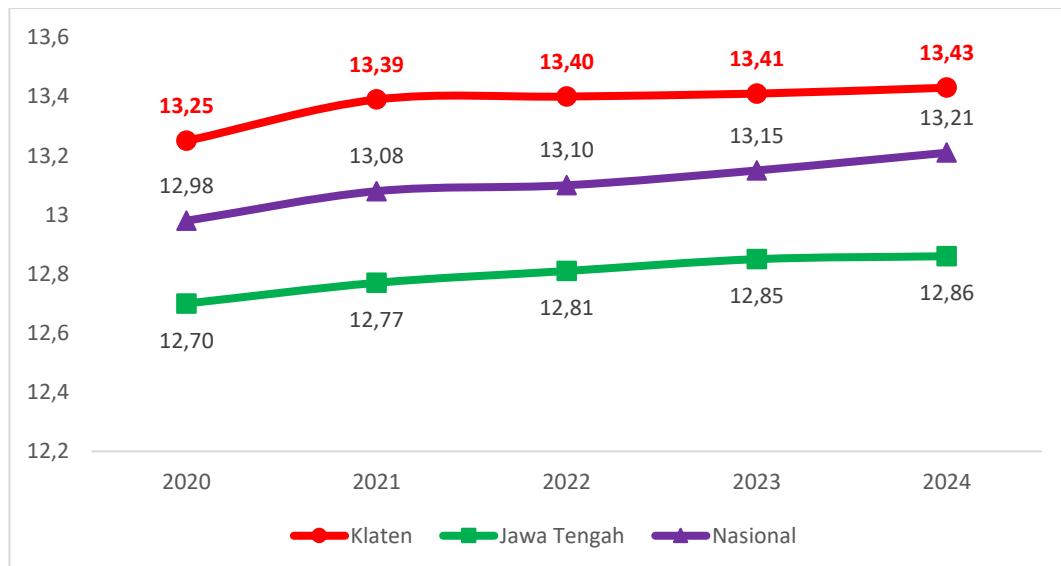
Sumber: BPS Jawa Tengah, 2025

Gambar 2.48 Posisi Relatif Umur Harapan Hidup Kabupaten Klaten dengan Kabupaten/Kota Sekitar Tahun 2024



2. Dimensi Pengetahuan

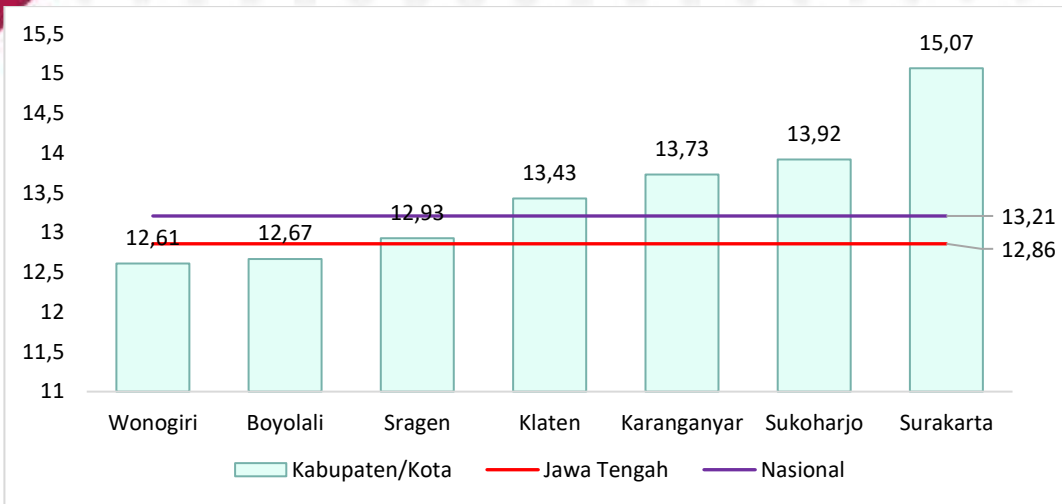
Dimensi pengetahuan pada IPM dibentuk oleh dua indikator, yaitu Harapan Lama Sekolah (HLS) penduduk usia 7 tahun ke atas dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) penduduk usia 25 tahun ke atas. Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan lamanya sekolah (tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. HLS di Kabupaten Klaten mengalami peningkatan yang signifikan dalam kurun waktu 2020-2024. Angka HLS mengalami kenaikan dari 13,25 tahun pada tahun 2020 menjadi sebesar 13,43 tahun pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat partisipasi pendidikan semakin baik pada setiap jenjang pendidikan. Ini berarti bahwa anak-anak di Kabupaten Klaten memiliki harapan untuk dapat menempuh pendidikan formal selama 13,43 tahun atau menamatkan pendidikan hingga Diploma Satu dan mulai masuk ke jenjang Diploma Dua. Capaian HLS Kabupaten Klaten lebih tinggi dibandingkan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional.



Sumber: BPS Jawa Tengah, 2025

Gambar 2.49 Perkembangan Harapan Lama Sekolah (HLS) Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2020-2024

Jika dibandingkan dengan Kabupaten/Kota sekitarnya, HLS Kabupaten Klaten pada tahun 2024 menempati urutan keempat. Posisi tertinggi pertama ditempati oleh Kota Surakarta (15,07 tahun) diikuti oleh Kabupaten Sukoharjo (13,92 tahun) dan Kabupaten Karanganyar (13,73 tahun). Namun demikian, capaian HLS Kabupaten Klaten berada di atas rata-rata Capaian HLS Provinsi Jawa Tengah dan Nasional

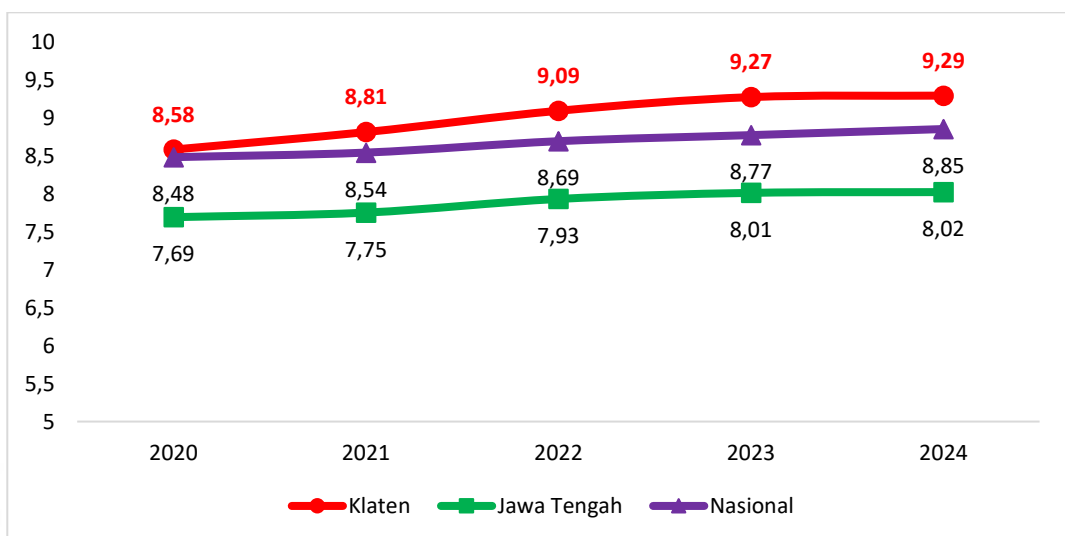


Sumber: BPS Jawa Tengah, 2025

Gambar 2.50 Posisi Relatif Harapan Lama Sekolah (HLS) Kabupaten Klaten dengan Kabupaten/Kota Sekitar Tahun 2024

Perkembangan Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Klaten tahun 2024 sebesar 9,29 tahun mengalami peningkatan dibanding tahun 2023 sebesar 9,27 tahun.

Angka ini menunjukkan rata-rata penduduk Kabupaten Klaten usia 25 tahun ke atas telah menyelesaikan pendidikan selama 9,09 tahun atau masuk kelas IX (SMP kelas tiga). Di lihat dari tren perkembangan Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Klaten selama kurun waktu 2020 hingga 2024 selalu menunjukkan peningkatan serta berada diatas capaian Provinsi Jawa Tengah dan capaian Nasional. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa minat penduduk usia 15 tahun keatas untuk menempuh jenjang pendidikan yang lebih tinggi makin meningkat.

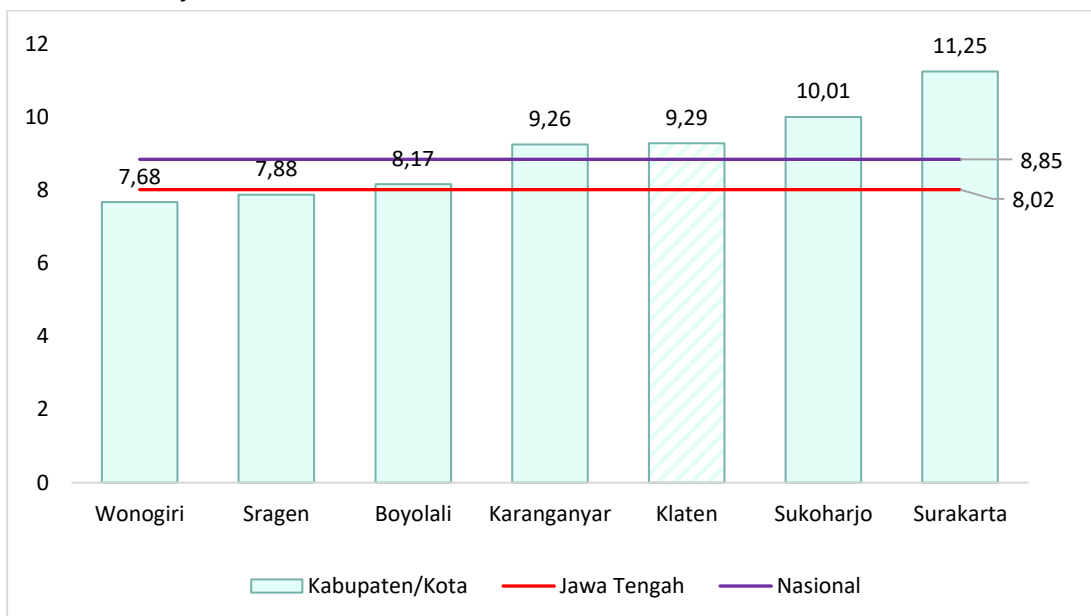


Sumber: BPS Jawa Tengah, 2024

Gambar 2.51 Perkembangan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2020-2024



Pada tahun 2024, Rata-Rata Lama Sekolah di Kabupaten Klaten menempati peringkat tiga teratas di wilayah Subosukawonosraten, setelah Kota Surakarta dan Kabupaten Sukoharjo. Capaian ini menunjukkan bahwa Kabupaten Klaten memiliki kinerja yang cukup baik dalam sektor pendidikan. Bahkan, Rata-Rata Lama Sekolah di Kabupaten Klaten tercatat lebih tinggi dibandingkan rata-rata Provinsi Jawa Tengah maupun rata-rata Nasional. Hal ini mencerminkan adanya peningkatan akses dan partisipasi masyarakat dalam pendidikan formal, serta keberhasilan pemerintah daerah dalam mendorong pembangunan sektor pendidikan yang merata dan berkelanjutan.

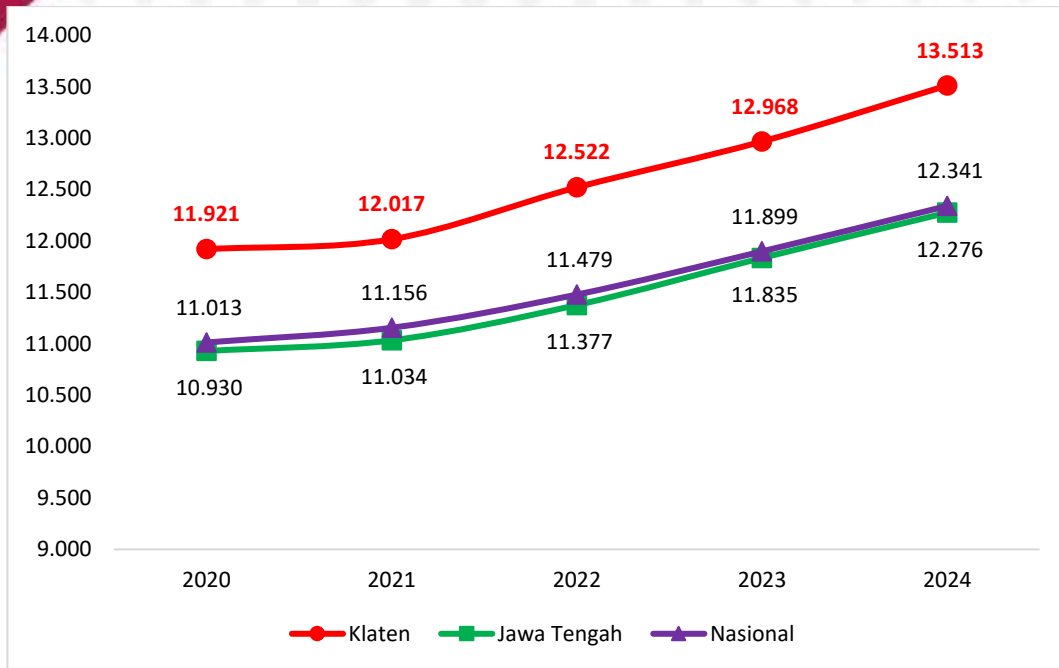


Sumber: BPS Jawa Tengah, 2024

Gambar 2.52 Posisi Relatif Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) Kabupaten Klaten dengan Kabupaten/Kota lainnya di Wilayah Subosukawonosraten Tahun 2024

3. Dimensi Standar Hidup Layak

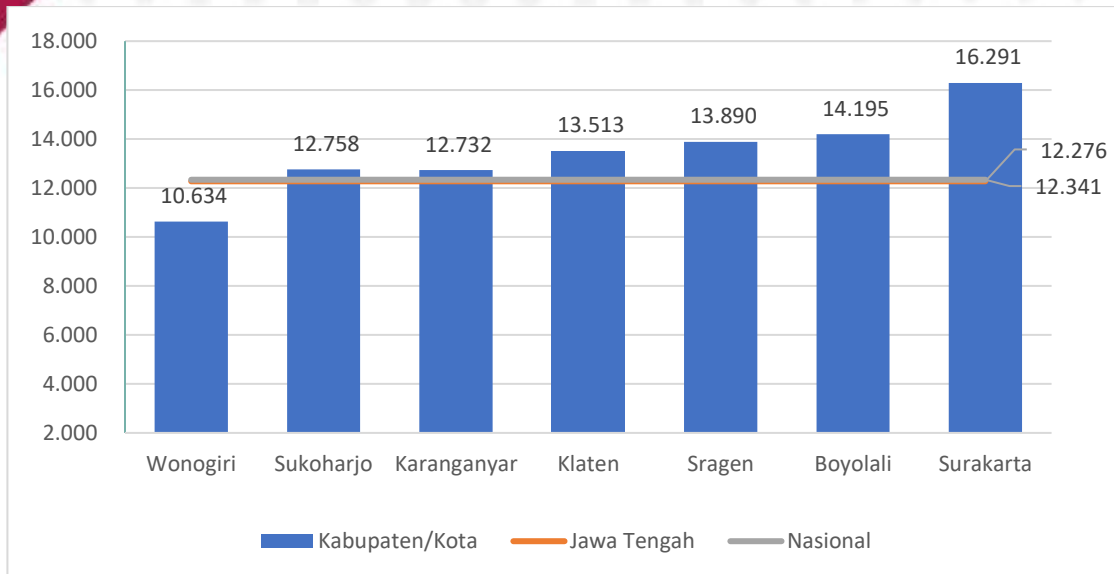
Kondisi Pengeluaran per kapita (PPP) Kabupaten Klaten terus membaik ditunjukkan dengan meningkatnya nilai PPP. Pada tahun 2024 tercatat sebesar Rp13.513 meningkat dibanding tahun sebelumnya sebesar Rp12.968. angka ini menunjukkan rata-rata pengeluaran per kapita penduduk Kabupaten Klaten sebesar Rp13.513 per bulan. Di lihat dari tren perkembangan PPP Kabupaten Klaten selama kurun waktu 2020 hingga 2024 selalu menunjukkan peningkatan dan berada diatas capaian Provinsi Jawa Tengah dan capaian Nasional.



Sumber: BPS Jawa Tengah, 2024

Gambar 2.53 Perkembangan Pengeluaran per Kapita yang disesuaikan (PPP) Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2020-2024

Pada tahun 2024, pengeluaran per kapita Kabupaten Klaten berada pada peringkat keempat terendah di antara kabupaten/kota di wilayah Subosukawonosraten. Meskipun demikian, capaian tersebut masih berada di atas rata-rata Provinsi Jawa Tengah maupun rata-rata Nasional. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun tingkat pengeluaran masyarakat Klaten relatif lebih rendah dibandingkan beberapa daerah di sekitarnya, daya beli dan konsumsi masyarakat secara umum masih cukup baik jika dibandingkan dengan rata-rata Provinsi dan Nasional. Hal ini dapat menjadi indikasi stabilitas ekonomi masyarakat serta efektivitas program pengendalian inflasi dan peningkatan kesejahteraan yang dijalankan pemerintah daerah.



Sumber: BPS Jawa Tengah, 2024

Gambar 2.54 Posisi Relatif Pengeluaran Per Kapita disesuaikan Kabupaten Klaten dengan Kabupaten/Kota lainnya di Wilayah Subosukawonosraten Tahun 2024

2.2.2. Kesehatan untuk Semua

Pembangunan kesehatan di Kabupaten Klaten bertujuan untuk meningkatkan umur harapan hidup dan kesejahteraan Masyarakat. Derajat kesehatan masyarakat dipengaruhi oleh faktor lingkungan, perilaku, layanan kesehatan dan keturunan. Kesehatan merupakan modal utama sumber daya manusia untuk mencapai kesejahteraan, sehingga peningkatannya berdampak langsung maupun tidak langsung terhadap berbagai program pembangunan. Di Kabupaten Klaten, derajat kesehatan masyarakat menunjukkan peningkatan, terlihat dari Usia Harapan Hidup (UHH) tahun 2024 yang mencapai 77,30 tahun. Capaian ini didukung oleh keberhasilan berbagai program kesehatan, perbaikan gizi, sanitasi, serta penanggulangan kemiskinan.

Angka Kematian Ibu (AKI) menjadi indikator penting kesehatan masyarakat. Di Kabupaten Klaten, AKI sempat meningkat dari 17 kasus pada tahun 2020 menjadi 45 kasus di tahun 2021, namun berhasil ditekan hingga 10 kasus pada tahun 2024 berkat peningkatan fasilitas kesehatan, edukasi kehamilan dan jaminan kesehatan ibu hamil. Masalah gizi seperti stunting juga masih menjadi perhatian. Pada tahun 2024, prevalensi stunting balita menurun menjadi 13,88%, lebih rendah dari target nasional 14%. Stunting disebabkan oleh kurangnya asupan gizi dan kondisi kesehatan yang dipengaruhi akses pangan bergizi dan layanan kesehatan. Pemerintah terus meningkatkan akses layanan kesehatan melalui pembangunan sarana-prasarana, penambahan dan peningkatan kompetensi tenaga medis, serta penyediaan jaminan kesehatan. Pada tahun 2023 tercatat sebesar 98,67% penduduk Klaten telah memiliki



jaminan kesehatan nasional, mendukung perlindungan kesehatan secara menyeluruh.

Peningkatan indikator kesehatan di Kabupaten Klaten mencerminkan efektivitas berbagai program intervensi pemerintah. Namun, tantangan seperti pemerataan kualitas layanan, gizi anak dan edukasi kesehatan tetap harus menjadi fokus utama agar capaian kesehatan yang tinggi dapat dinikmati secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat. Perkembangan capaian Pembangunan Kesehatan dalam kurun waktu 2020-2024 sebagai berikut.

Tabel 2.34
Perkembangan Capaian Pembangunan Urusan Kesehatan
Kabupaten Klaten Tahun 2020-2024

Indikator	Satuan	Tahun Ke-				
		2020	2021	2022	2023	2024
Usia Harapan Hidup (UHH)	Tahun	76,78	76,86	76,95	77,07	77,30
Jumlah Kasus Kematian Ibu	Kasus	17	45	11	11	10
Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	%	12,95	11,40	14,90	13,90	13,88
Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (treatment coverage)	%	39,67	47,20	61,50	96,90	79,10
Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate)	%	79,30	87,60	85,6	88,30	85,50
Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional	%	89,00	95,40	95,73	98,67	98,82

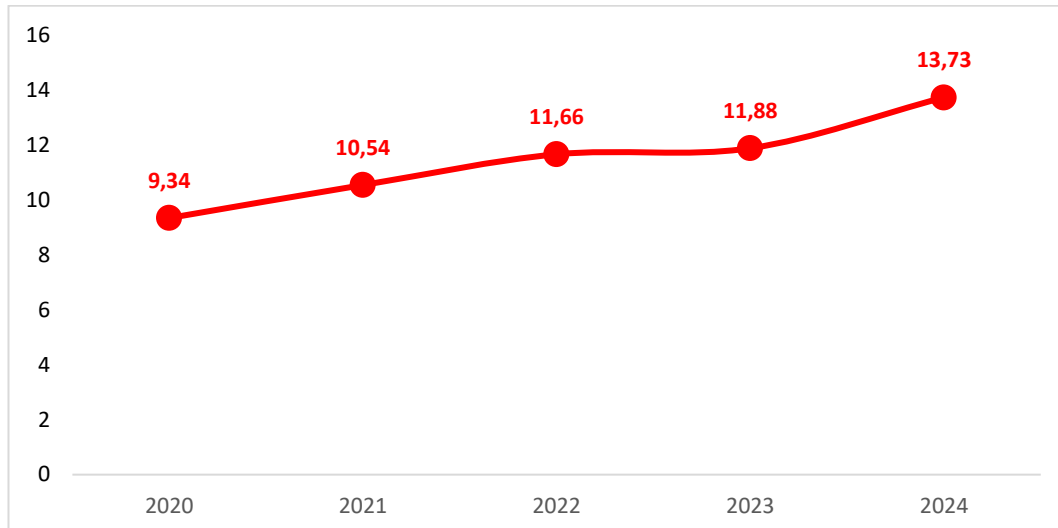
Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten, 2025

Angka kematian bayi (AKB) merupakan indikator yang mencerminkan derajat kesehatan masyarakat yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik yang berkaitan dengan kondisi ibu dan bayi, maupun faktor lingkungan dan sosial. Kemajuan yang dicapai dalam bidang pencegahan dan pemberantasan berbagai penyakit penyebab kematian akan tercermin secara jelas dengan menurunnya tingkat AKB. Dengan demikian AKB merupakan tolok ukur yang sensitif dari semua upaya intervensi yang dilakukan oleh pemerintah khususnya di bidang Kesehatan.

AKB di Kabupaten Klaten tahun 2024 sebesar 13,73/1000 kelahiran hidup dan kondisi ini meningkat dibandingkan AKB tahun 2023 sebesar 11,88/1000 kelahiran hidup. Penyebab terbesar kematian bayi baru lahir adalah Berat Badan Lahir Rendah (BBLR), asfiksia, kelainan kongenital dan sepsis. Untuk menurunkan Angka Kematian Bayi, beberapa upaya yang dapat dilakukan antara lain: 1).Menerapkan perilaku sehat, 2).Imunisasi sebagai upaya pencegahan, 3).Pengentasan kemiskinan, 4).Akses kepada layanan kesehatan dasar yang



mudah dan murah. Selain itu juga dibutuhkan upaya-upaya untuk menurunkan AKB saat pandemi diantaranya: optimalisasi telemedicine untuk pemeriksaan ibu hamil tanpa resiko tinggi, optimalisasi kunjungan hamil dan kunjungan neonatus, optimalisasi program ANC Terpadu dan P4K, serta optimalisasi pemantauan dan perkembangan bayi melalui posyandu.



Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten 2025

Gambar 2.55 Perkembangan Angka Kematian Bayi di Kabupaten Klaten Tahun 2020 -2024

Sejalan dengan angka kematian bayi, Angka Kelangsungan Hidup Bayi (AKHB) yang mencerminkan probabilitas bayi hidup sampai dengan usia 1 tahun turun terdampak. AKHB di Kabupaten Klaten pada tahun 2024 menurun menjadi 986,27. Untuk mempertahankan atau meningkatkannya, ibu hamil didorong rutin memeriksakan kehamilan, mengonsumsi gizi seimbang, serta melakukan persalinan di fasilitas kesehatan dengan bantuan tenaga medis. Berikut perkembangan Angka Kelangsungan Hidup Bayi di Kabupaten Klaten tahun 2020-2024